

Iman Hilman Faturachman
Supyan Dimyati
Lutfi Fahrul Rizal

SIGNIFIKANSI PENANGANAN HUMAN TRAFFICKING DI JAWA BARAT



Signifikansi Penanganan Human Trafficking di Jawa Barat

Penulis:

Iman Hilman Faturachman, M.Ag

Drs. Supyan Dimiyati, M.Ag

Lutfi Fahrul Rizal, S.Sy., M.H

ISBN: 978-623-99024-1-4

Penyunting:

Muhammad Abduh

Desain Sampul dan Tata letak:

Alan Maulana

Penerbit:

PT. Liventurindo

Jl. Cigentur, Paseh - Bandung

Tlp. 081221759136

liventurindo@gmail.com

iii + 113 hlm.; 24 cm.

Cetakan pertama, Oktober 2021

Hak cipta dilindungi undang- undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin.

Segala puji kami panjatkan kehadiran *Illahi Rabbi* yang telah memberikan kemudahan dan kemampuan kepada kami dan juga shalawat serta salam semuga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW.

Setelah melalui proses yang panjang, penyusunan buku dari hasil penelitian yang berjudul *Signifikansi Penanganan Human Trafficking di Jawa Barat* ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Mudah-mudahan buku ini dapat menghadirkan banyak manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Penulis menyadari betul dalam penyusunan buku ini terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karenanya penulis berharap buku ini dapat dibaca oleh banyak orang, selain untuk memberikan manfaat bagi pembaca juga bagi penulis dalam rangka mendapatkan koreksi dari pembaca yang budiman. Selamat membaca.

Bandung, Oktober 2021
Penulis

Ttd,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Teori	6
1. Hak Asasi Manusia.....	6
2. Public Orientation.....	21
3. Human Trafficking	43
BAB 3 : METODE PENELITIAN.....	52
A. Metode dan Teknik Penggalan Data.....	52
B. Desain Penelitian	53
C. Jenis Penelitian	54
D. Sifat Penelitian.....	56
E. Pendekatan Penelitian.....	57
F. Sumber Data Penelitian	57
G. Metode Analisis Data	58
BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Barat.....	60

1. Indikator Besaran Permasalahan Kesejahteraan Sosial .	75
2. <i>Rating</i> PMKS Potensi Human Trafficking	100
B. Penanganan Permasalahan Sosial (PMKS) di Jawa Barat.....	106
 BAB 5 : PENUTUP	 111
A. Simpulan.....	111
B. Rekomendasi	112
 DAFTAR PUSTAKA	 113

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia terlahir secara deklaratif pada momentum pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia pertanggal 17 Agustus tahun 1945 yang sampai dengan hari ini telah ditetapkan sebagai hari kemerdekaan republik Indonesia. Sebagai negara yang telah memiliki keutuhan komponen-komponen sebagai unsur pembentuk suatu negara. Indonesia tentu saja memiliki tujuan nasional yang telah disepakati bersama-sama dengan para founding father melalui sebuah musyawarah mufakat.

Tujuan tersebut, berbunyi : “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Subtansi dari tujuan nasional yang telah ditetapkan dapat diurai menjadi beberapa bagian, sebagai berikut :

1. Perlindungan, yakni keberadaan negara sebagai pelindung (guard) bagi rakyat yang terhimpun dalam sebuah tanah yang disebut dengan negara. Negara harus mampu menjamin keselamatan dan tumpah darah bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman apapun, baik secara internal maupun secara eksternal. Selain itu, negara pula harus memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh isi kekayaan negara, baik itu sumber daya alam maupun yang lainnya sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa

dan bernegara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun, perlindungan ni tidak hanya menjadi tugas daripada negara saja, masyarakat sebagai warga negara juga harus memiliki peran dalam upaya mewujudkan perlindungan tersebut, salah satu caranya dengan upaya membela negara dan mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif.

2. Kesejahteraan, keberadaan negara harus memberikan garansi kesejahteraan bagi Bangsa Indonesia, paling tidak meliputi 3 hal, yakni : sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal). Selain tu, beberapa aspek kesejahteraan masyarakat juga haruslah menjadi perhatian negara, dengan begitu kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat tercapai.
3. Kecerdasan, yakni keberadaan negara yang harus memberikan pendidikan dalam upaya mencerdaskan bangsanya agar menjadi masyarakat yang cerdas. Pendidikan di Indonesia saat ni terdiri dari pendidikan usia di ni selama 2 tahun, pendidikan dasar selama 6 tahun, pendidikan menengah pertama selama 3 tahun, pendidikan menengah atas selama 3 tahun dan pendidikan tinggi mulai dari S1, S2 hingga S3. Bangsa Indonesia sangat diharuskan menempuh pendidikan agar tercipta bangsa yang cerdas, oleh karena tu negara harus hadir dalam hal ni, sebab pendidikan merupakan kebutuhan pokok danutama yang dibutuhkan oleh masyarakat.
4. Ketertiban, perdamaian akan sangat membantu proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik, sebaliknya jika keadaan kacau atau disharmoni akan terjadi keburukan. Ketertiban atau perdamaian disamping menjadi tugas negara dalam pergaulan nternasional, juga dapat diperankan oleh warganegara dalam upaya menciptakan ketertiban secara nternal. Mengingat negara

Indonesia sebagai negara yang dihuni oleh bangsa yang majemuk dan bernaka ragam, baik ttu dari suku, ras, etnis maupun agama.

Upaya mewujudkan tujuan nasional yang sangat deal bukanlah jalan yang mudah untuk ditempuh, perlu kerjasama dan kekuatan soliditas yang tinggi agar tujuan tersebut dapat tercapai. Situasi dan kondisi yang menerpa bangsa Indonesia, khususnya masyarakat di Jawa Barat dapat dijadikan sebagai indikator permasalahan pencapaian tujuan nasional. Permasalahan yang dimaksud adalah perihal penyandang maslah sosial dan kesejahteraan (PMKS) di Jawa Barat yang masih cukup tinggi. PMKS adalah mereka yang mengalami hambatan atau gangguan atau bahkan kesulitan sehingga tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga, tidak terpenuhi kebutuhan jasma ni (sandang, pangan, papan) maupun rohaninya. Pada tahun 2016, didapatkan data PMKS sebagai berikut:¹

Tabel 1.1

Kabupaten/Kota		Anak Terlantar	Lansia/ Jompo	Anak Nakal	Korban Narkotika	Cacat	Gelandangan & Pengemis	Tuna Susila	Anak Wanita dan Lansia Korban Tindak Kekerasan	Orang Dengan HIV/AIDS	Bekas Narapidana
1.	Garut	71	80.686	26	1.642	8.275	371	173	58	660	815
2.	Subang	7.134	23.278	52	78	9.236	136	139	4	417	156
3.	Purwakarta	495	960	7	58	2.897	133	371	-	204	120
4.	Kota Tasikmalaya	6.290	3.125	22	4	1.200	43	67		228	2.709
Jawa Barat		135.787	298.572	2.592	5.935	128.615	12.282	5.271	260	18.106	11.374

¹ Data Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Salah satu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah terutama PMKS pada aspek Gelandangan/Pengemis dan juga Tuna Susila. Alasan penentuan hal tersebut didasari oleh fakta awal yang didapatkan oleh peneliti, bahwa PMKS pada kedua aspek tersebut cenderung mengalami human trafficking dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif ke dalam bentuk kejahatan luar biasa. Sebagai contoh, para PSK dalam menjalankan operasinya selalu saja di beking oleh “Mami” atau “Germo”, selain itu pula mereka pengemis dan gelandangan selalu ada orang yang menjadi dalang/beking. Berdasarkan tabel tersebut, tingkat PMKS di Jawa Barat pada aspek Gepeng dan Tuna Susila masih cukup tinggi. Akan tetapi berdasarkan fakta di lapangan setiap kota/kabupaten, terutama di jalanan protokol atau utama masih banyak gepeng yang berkeliaran, hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini juga mencoba untuk mengukur tingkat efektivitas pola penanganan dan penanggulangan agar tingkat PMKS pada aspek gepeng dan tuna susila dapat ditekan atau bahkan dihilangkan sama sekali. Berbekal pengetahuan dan data awal peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh permasalahan yang berkaitan dengan isu penelitian tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, dirumuskan dua pertanyaan utamapenelitian, yaitu;

1. Bagaimana besaran permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial Jawa Barat?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari perumusan dan latar belakang permasalahan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran permasalahan dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial Jawa Barat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak hukum yang harus dimiliki oleh tiap orang sebagai manusia. HAM merupakan hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia haruslah dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi.

Hak Asasi Manusia muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasanya semua manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan adalah sama dan sederajat. Manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama. Atas dasar itulah manusia harus diperlakukan secara sama adil dan beradab. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan atas ras, agama, suku dan bangsa (etnis)

Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membeda-bedakan suku, golongan, keturunan, jabatan², ras, warna kulit, umur. Hak Asasi itu sendiri merupakan hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan *nheren* dengan jati diri manusia secara universal.³ Siapapun manusia dan

² <http://www.slideshare.net/kujays/makalah-11850826#btnNext>, diakses Sabtu 24 November 2012.

³ Majna El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi I Indonesia*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 47.

dimanapun juga berhak memiliki hak tersebut. Artinya disamping keabsahan terjadi dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya baik secara individu ataupun individu yang berada di kelompok sosial yang bersifat universal oleh individu itu sendiri, negara dan masyarakat internasional.

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.

Terkait tentang hakikat hak asasi manusia, maka sangat penting sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus saling menjaga dan menghormati hak asasi masing-masing individu. Namun pada kenyataannya, kita melihat perkembangan HAM di Negara ini masih banyak bentuk pelanggaran HAM yang sering kita temui. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan. Tidak ada siapapun yang bisa menggugat dan mengganggu hak yang dimiliki oleh masing-masing tersebut. Seyogyanya setiap orang harus menghormati dan menghargai setiap hak yang dimilikinya masing-masing, beberapa hak tersebut diantaranya : hak untuk

hidup, hak keadilan dan hak lainnya. Hak Asasi Manusia atau yang dikenal dengan sebutan HAM adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia yang bersifat alamiah artinya hak tersebut bukanlah anugrah dari negara atau organisasi tertentu, tetapi hak asasi manusia telah dimiliki oleh manusia semenjak manusia tersebut berada di dalam kandungan. Hak ini berlaku seumur hidup, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.

Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
- c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar

HAM.

Adapun Prinsip-Prinsip Pokok Hak Asasi Manusia adalah:⁴

- a. Universal dan tidak dapat dicabut (*universality & nalienability*)

Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan seluruh umat manusia di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela ataupun dicabut. Hal ini selaras dengan pernyataan yang tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia “Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya”.

- b. Sederajat dan tanpa diskriminasi (*equality & non-discrimination*)

Setiap individu sederajat sebagai manusia dan memiliki kebaikan yang *nheren* dalam harkat dan martabat masing-masing. Setiap umat manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada perbedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lainnya, kewarganegaraan, latar belakang sosial, cacat dan kekurangan, tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh badan pelaksana hak asasi manusia.

⁴<http://www.komnasham.go.id/pendidikan-dan-penyuluhan/848-prinsip-prinsip-pokok-hak-asasi-manusia>, diakses Juli 2013.

Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada bulan Agustus 1990, berdasarkan Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi Hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak 5 Oktober 1990. Dengan demikian Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin harus berupaya memenuhi hak-hak anak dan bila perlu mengadakan kerja sama bilateral atau multilateral sebagaimana dinyatakan oleh konvensi.

Sebagai Negara yang menganut sistem hukum, Indonesia memiliki perhatian yang sangat serius terhadap keberadaan HAM di Negaranya. Sebagaimana yang telah menjadi cita-cita berdirinya Negara Indonesia yang dijabarkan dalam pembukaan UUD 45. dimulai dari alinea 1 sampai dengan 4 :⁵

Alinea 1: *Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*

Makna yang terkandung dalam alinea pertama menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menaruh hormat dan perhatian yang besar terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap individu. Sebab, kemerdekaan merupakan kodrati yang diberikan oleh tuhan kepada semua makhluknya, tidak hanya manusia saja sekalipun flora dan fauna memiliki hak itu. Oleh karenanya, kemerdekaan berhak dirasakan oleh siapapun tanpa terkecuali dan tidak membenarkan segala bentuk penjajahan dengan alasan apapun.

⁵ Pembukaan UUD 45

Penjajahan dianggap sebagai bentuk kejahatan luar biasa karena tidak sesuai dengan nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan. Alasan tuhan memberikan kehidupan kepada makhluknya tentu saja sangat berdasar, begitupun sebaliknya hanya tuhan yang berhak mengambil kembali kehidupan yang telah diberikan kepada makhluknya. Manusia dihadapan tuhan tidak memiliki perbedaan atau keistimewaan, semua dianggap sama. Hanya saja nilai-nilai spiritual yang menjadi pembeda kedudukan manusia dihadapan tuhan yang disesuaikan dengan tuntunan dan ajaran keagamaan yang diyakini oleh setiap manusia masing-masing.

Alinea 2 : *Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.*

Sebagaimana bangsa besar yang merupakan gabungan dari beberapa kerajaan yang bernama nusantara. Pernyataan kemerdekaan Negara Indonesia dilandasi komitmen dan konsistensi yang kuat, yakni mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Kemaslahatan umum diyakini sebagai maksud muara segala bentuk tujuan Negara Indonesia. Keberadaan Negara harus bisa menjamin dan memastikan kemaslahatan yang meliputi perdamaian, ketertiban, keamanan dan ketentraman dirasakan oleh bangsa Indonesia.

Alinea 3 : *Atas berkat rahmat Allah Yang Maha*

Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religious, dalam alinea ini dipertegas kembali sebagai bentuk rasa syukur dan pengakuan bahwa kemerdekaan yang telah diperoleh dihasilkan atas berkat dan rahmat pemberian tuhan.

Maka, bangsa Indonesia menganggap keberadaan nilai-nilai spiritualitas sangat penting dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Alinea 4 : *Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

Tujuan pendirian Negara Indonesia terangkum dalam alinea ini, beberapa poin penting yang menjadi titik tekan tujuannya, yakni : *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban*

dunia.

Empat tujuan mulia negara yang terkandung dalam alinea ini lebih menekankan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai pemberian dari tuhan yang maha esa. Maksudnya, Indonesia menolak segala bentuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ke empat poin tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk pertentangan terhadap cita-cita Negara. Penjabaran yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 tersebut seolah mempertegas bahwasanya HAM menjadi focus perhatian yang sangat penting di Negara Indonesia, artinya setiap bentuk pelanggaran HAM yang terjadi maka harus segera dilakukan penanganan sampai tuntas sehingga dapat menimbulkan efek jera dan tidak terulang kembali. Selain itu, bentuk perhatian lain terhadap HAM, Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang menjadi penegakkan HAM, diantaranya :

1) Pancasila

Makna yang terkandung dalam pancasila mulai sila ke-1 sampai ke-5 jika diinterpretasikan sebagai penjelasan hakikat penciptaan manusia oleh tuhan sebagai makhluk individu sekaligus sosial. Oleh karena manusia tersebut tidak dapat hidup secara mandiri dan individual, dipastikan membutuhkan bantuan dan pertolongan oranglain. Maka setiap manusia akan tergabung dalam sebuah kelompok masyarakat yang disebut dengan bangsa.

Kedaan bangsa Indonesia yang bersifat heterogen, berlatar belakang etnis, ras dan agama yang berbeda-beda. Maka, pancasila menanamkan nilai-nilai universal agar dipedomani oleh seluruh bangsa Indonesia. Nilai universal yang dimaksud dalam sila pertama berarti bahwasanya manusia diciptakan oleh tuhan, maka berlakulah

hubungan hak dan kewajiban antara pencipta dan yang diciptakan.

Dalam sila kedua berarti menghendaki fase kehidupan yang memiliki nilai, etika dan masa peradaban yang lebih baik, berlaku adil terhadap sesama. Dalam sila ketiga berarti, komitmen untuk tetap bersatu sekalipun dilatarbelakangi oleh berbagai perbedaan yang ada. Keyakinan terjaganya nilai persatuan akan dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebaliknya akan mudah hancur jika terjadi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia.

Selanjutnya, dalam sila keempat, hal ini berarti pelaksanaan segala kehendak yang dimiliki oleh setiap individu tidak mungkin dapat diakomodir sepenuhnya. Sebab, jumlah bangsa Indonesia yang sangat banyak disertai latar belakang yang sangat beraneka ragam, tidak mudah untuk mewujudkan keinginan setiap individu. Oleh karenanya, segala bentuk aspirasi dapat disalurkan melalui individu atau lembaga perwakilan untuk nantinya dimusyawarahkan dan dihasilkan sebuah keputusan atau kebijakan dari proses musyawarah tersebut.

Terakhir, dalam sila kelima dimaknai sebagai penegasan bahwa setiap keputusan atau kebijakan apapun harus memiliki nilai publik (*public opinion*). Artinya, setiap kebijakan harus mencerminkan kepentingan umum dan memperhatikan nilai-nilai keadilan agar benar-benar ditegakkan dan tidak dicerai. Setiap orang harus menghargai dan melaksanakan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat demi kepentingan bersama.

2) UUD 45

Merupakan aturan dasar negara kedua setelah Pancasila. Di dalam UUD 45 ini berisi penjelasan turunan makna yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan HAM, secara tegas diatur dalam

Pasal 28A sampai 28J, yang menyatakan bahwa setiap warga Negara indonesai mesti mendapatkan jaminan dan kesetaraan dalam setiap hak tanpa harus memperhatikan aspek diskriminatif, beberapa hak yang diatur diantaranya :⁶

- a) Hak hidup dan mempertahankan kehidupannya.
- b) Hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- c) Hak anak untuk tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.
- d) Hak mendapat pendidikan. Hak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
- e) Hak mendapat pekerjaan dan perlakuan yang adil.
- f) Hak atas status kewarganegaraan.
- g) Hak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya.
- h) Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikapnya sesuai hati nurani.
- i) Hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- j) Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi.
- k) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda dan mendapat rasa aman.
- l) Hak untuk bebas dari penyiksaan atau segala bentuk tindakan merendahkan derajat manusia.

⁶ UUD 45 Pasal 28A – 28J

- m) Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.
- n) Hak untuk bebas dari perilaku diskriminatif.

3) UU 39 Tahun 1999 Tentang HAM

4) Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Di Indonesia memiliki banyak instansi dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan penegakkan HAM, sebut saja Komisi Nasional HAM, Pengadilan HAM, Lembaga Bantuan Hukum, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, mparsial, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia dan lainnya. Semua lembaga ini tentunya membutuhkan tenaga penggerak dari masyarakat untuk menegakkan HAM.

Salah satu fungsi masyarakat adalah sebagai agen kontrol sosial. Segala tindakan yang pemerintah lakukan dalam rangka menegakkan HAM tentunya memiliki berbagai kekurangan disana si ni. Maka dari tu, menjadi tugas bagi kita untuk menemukan celah-celah tersebut sambil merumuskan solusi terhadap permasalahan itu dan selanjutnya adalah menyampaikan pada pemerintah.

Namun dalam kenyataannya, kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kekerasan, eskploitasi, diskriminasi, bahkan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa a dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang

memadai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang tegak prinsip non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif. Konvensi Hak Anak adalah salah satu instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak.

Konvensi ini diadopsi (disetujui) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat Resolusi 44/25 tertanggal 20 November 1989 (Lembar Fakta HAM, 2000:121) dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1), mulai berlaku pada 2 September 1990. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, pada September 1990 telah ada 20 negara yang secara sah telah menandatangani dan memberlakukan Konvensi ini, setidaknya hingga Desember 1996, tercatat 187 negara telah meratifikasi.

Konvensi Hak Anak merupakan hasil kompromi dari berbagai sistem hukum dan falsafah berbagai negara. Kompromi dilakukan karena tiap negara memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda mengenai anak. Meski demikian, Konvensi tetap berpegang teguh pada standar dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Anak dalam Konvensi ini adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus.⁷

Manusia menurut kodratnya memiliki hak yang sama dan

⁷Riza Nizarli, Makalah : *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak*, Disampaikan pada Acara Penjaringan Aspirasi Publik dalam Rangka Pembuat Qanun Perlindungan Anak, Kerjasama Biro PP, Unicef dan Plan International, Jantho, 26 Maret 2007.

melekat pada diri orang itu sendiri tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang secara universal disebut Hak Asasi Manusia (HAM). istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan. HAM yang merupakan hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, abadi yang berhubungan dengan harkat martabat manusia, dimiliki sama oleh setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, usia, bahasa, status sosial, pandangan politik, dan lain-lain.

Berdasarkan pelaksanaannya kemudiannya, sejumlah unsur penting tersebut diwujudkan dengan baik. Terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, UUD 1945 setelah perubahan cukup mengakomodir masalah hak asasi manusia secara lengkap. Bahkan dapat dikatakan jauh lebih lengkap dari pengaturan yang terdapat dalam konstitusi yang pernah berlaku sebelumnya.

Laki-laki maupun perempuan memiliki derajat dan kedudukan yang sama sejak lahir yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Selain itu, manusia juga memiliki hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya serta bebas dari penindasan atau yang merugikan pribadinya. Dengan kata lain, hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan atau yang dikenal dengan istilah Hak Asasi Manusia (HAM). HAM yang merupakan hak dasar seluruh umat manusia; sebagai anugerah Tuhan yang maha esa dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.

Hak untuk hidup bagi manusia merupakan hak yang

mendasari dari pribadi masing-masing, baik yang berkulit hitam atau pun kulit putih semua memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, maka dari kita harus bisa menghargai hak-hak seseorang. Seharusnya, dengan adanya undang-undang tentang HAM kita bisa lebih menghargai hak-hak dan kedudukan seseorang bukan berlaku yang seenaknya terhadap orang lain.

Salah satu permasalahan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia dimana kasusnya adalah perdagangan orang, perdagangan orang ini marak terjadi di mana kasus ini sering terjadi pada perempuan dan anak, motif dari kasus ini bermacam-macam seperti penculikan, menjanjikan memberikan uang banyak kepada korban, yang sering terjadi pada kasus ini adalah perempuan dewasa di mana perempuan dewasa ini di perdagangan untuk memenuhi hawa nafsu lelaki hidung belang.

Salah satu permasalahan terkait HAM di Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang yang merupakan bentuk perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Eksplorasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Di Indonesia, kejahatan perdagangan orang mengambil bentuk perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan perkawinan pesanan yang sering terjadi di kalangan perempuan dan anak yang membuat seorang anak dan perempuan terikat dalam sebuah permainan seorang pelaku dan susah bagi mereka untuk keluar dari permainan tersebut. Disarankan kepada pemerintah dan penegak hukum agar membantu memecahkan kasus tersebut agar tidak terjadi lagi penindasan bahkan kehilangan masa depan bagi perempuan dan anak. Penegak hukum harus memberikan hukum yang sepatutnya bagi pelaku perdagangan orang pelaku tidak melakukan kejahatan yang lain dan dapat mengurangi kasus perdagangan orang. Dengan begitu, masa depan yang terbaik bagi perempuan dan anak. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat merusak masa depan perempuan dan anak karena kejahatan tersebut membuat perempuan dan anak harus mengikuti kemauan pelaku perdagangan orang.

Perlindungan hukum terhadap korban dari perdagangan orang sangat penting untuk diketahui. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap perempuan dan anak dalam perdagangan orang, yang di berikan oleh pemerintah agar dapat melindungi perempuan dan anak dari perdagangan orang yang dapat merusak masa deapan mereka.

Dengan adanya sebuah perlindungan hukum dari pemerintah, maka bisa mengedepankan hak-hak korban perdagangan orang yang sering marak terjadi. Dengan perlindungan hukum, perempuan dan anak bisa terhindar atau keluar dari kasus perdagangan orang. Kasus ni sering terjadi dikalangan perempuan remaja dan dewasa. Bahkan mereka dijadikan sebagai pemuas seks bagi kaum lelaki yang

berhidung belang. Setiap hari mereka harus melayani atau menjual harga diri mereka dengan bayaran yang cukup untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Kasus ini sangatlah memperhatikan dimana perempuan dan anak menjual harga diri mereka tiap hari.

Sangat disayangkan apabila kasus ini terus terjadi, maka masa depan perempuan dan anak akan hancur dan jika mereka pulang kembali dalam kehidupan mereka yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat, sulit bagi masyarakat untuk menerima mereka kembali, karna mereka di cap dengan perbuatan yang tidak baik, maka dari itu pemerintah diwajibkan untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak agar mereka tidak di cap yang tidak baik oleh masyarakat supaya mereka bisa kembali melangsungkan kehidupan mereka yang sebenarnya.

2. Public Orientation

Hukum merupakan indikator mutlak kedua yang harus dimiliki oleh sebuah negara yang menganut sistem hukum, maka negara tersebut haruslah dikatakan sebagai konstitusionalisme, yakni sebuah negara yang menganut sistem hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Hukum disini dalam arti memiliki peran dan fungsi sebagai rambu-rambu atau aturan main penyelenggaraan berbangsa dan bernegara tersebut. Keberadaan hukum diakui dan dijunjung tinggi sebagai bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat yang ditata dengan baik sedemikian rupa.

Kebijakan publik penting karena pilihan kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh mereka yang berkuasa mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari,

termasuk pendidikan, kesehatan dan keamanan nasional. Keputusan kebijakan publik dibuat setiap hari dan mencakup semua tingkat pemerintahan.

Pengaturan oleh hukum ini bersifat menyeluruh dari mulai hukum tingkat dasar sampai kepada pengaturan hal-hal yang lebih spesifik sebagai bentuk turunan dari hukum dasar itu sendiri. Supremasi hukum memiliki pengertian menempatkan hukum/aturan pada kedudukan tertinggi, aturan dijadikan sebagai pedoman hidup manusia dalam menjala ni segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Supremasi hukum sangat erat kaitannya dengan penegakkan hak asasi manusia. Meskipun dalam pengertiannya bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan hingga lahir dan hidup di du nia, namun berdasarkan catatan sejarah hidup manusia.

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau nstrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi reward dan sanctions. Secara sentralistik, kebijakan adalah nstrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah.

Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang

untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.⁸

Tak ayal, setelah mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia mulai menanamkan prinsip-prinsip HAM seperti yang tercantum dalam Konstitusi RI (Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945). ini artinya bahwa hak asasi manusia membutuhkan penopang agar keutuhannya tetap berdiri tegak, yakni dalam hal ini adalah dengan menjadikan hukum berada dalam kedudukan tertinggi (Supremasi Hukum).

Secara tertulis Indonesia telah mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum, yaitu dalam Pasal 1 ayat 3 UUD '45 bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Teori mengenai negara hukum dikemukakan oleh Jhon Lockce, bahwa "warga/masyarakat/rakyat tidak lagi diperintah oleh seorang raja atau apapun namanya, akan tetapi diperintah berdasarkan hukum". ini merupakan suatu syarat bahwa bagi negara hukum mutlak adanya penghormatan terhadap supremasi hukum. Namun, berdasarkan realita yang terjadi di negeri Indonesia, penegakkan hukum hanya dilakukan dalam arti pembangunan terhadap banyaknya perubahan rumusan perundang-undangan, bukan kemajuan perilaku akan ketaatan seluruh elemen negara terhadap hukum itu sendiri.

Telah dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang memiliki ciri :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.

⁸ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, Hal. 20

- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
- c. Legalitas, dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Indikator selanjutnya adalah kejelasan dan ketegasan tujuan negara itu sendiri harus benar-benar mengarah pada kepentingan public atau umum. Tujuan kepentingan negara harus betul-betul memperhatikan kehendak rakyat sebagai pemilik kekuasaan atau kedaulatan tu. Tujuan negara pada sebelumnya telah dirumuskan terlebih dahulu dalam penyusunan kebijakan public oleh pemilik kewenangan dalam merumuskan kebijakan itu sendiri, hal ini dilakukan sebagai langkah awal pemetaan kebijakan agar benar-benar memperhatikan kepentingan public dalam pelaksanaannya. Kebijakan publik mempunyai banyak pemahaman teoritis, diantaranya harold Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan sebagai suatu program yang di proyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai- nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. David Eason mendefinisikannya sebagai akibat dari aktivitas pemerintah. Kemudian Thomas R. Dye mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.⁹

Dari pemahaman teoritis tersebut, kita dapat merumuskan definisi sebagai berikut:

“Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi

⁹ H.A.R Tilaar dan Hant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan; pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal.183-184.

untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.”¹⁰

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.¹¹

Sedangkan proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.¹² Adapun teori tentang perumusan kebijakan, adalah pijakan awal dalam kebijakan publik. Dalam khasanah teori

¹⁰ *Ibid.*, hal.184-185.

¹¹ Sholichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, Hal. 5-7

¹² AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009), hal.8.

perumusan kebijakan, H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho dalam bukunya disebutkan setidaknya ada tiga belas jenis perumusan kebijakan, yaitu: ¹³

a. Teori Kelembagaan

Formulasi kebijakan dari teori kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Jadi, apapun yang dibuat pemerintah dengan cara apapun adalah kebijakan publik. ini adalah teori yang paling sempit dan sederhana dalam formulasi kebijakan publik. Teori ini mendasarkan kepada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah, di setiap sektor dan tingkat, dalam formulasi kebijakan. Menurut Dye ada tiga hal yang membenarkan pendekatan ini, yaitu bahwa pemerintah memang sah membuat kebijakan publik, fungsi tersebut bersifat universal, dan memang pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan (koersi) dalam kehidupan bersama.

Teori kelembagaan sebenarnya merupakan derivasi dari ilmu politik tradisional yang lebih menekankan struktur daripada proses atau perilaku politik. Prosesnya mengandaikan bahwa tugas formulasi kebijakan adalah tugas lembaga-lembaga pemerintah yang dilakukan secara otonom tanpa berinteraksi dengan lingkungannya. Salah satu kelemahan dari pendekatan ini adalah terabaikannya masalah-masalah lingkungan tempat kebijakan ini diterapkan.

¹³ *Ibid.*, hal.190-209.

b. Teori Proses

Dalam teori ini, para pengikutnya menerima asumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Untuk itu, kebijakan publik merupakan juga proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan:

- 1) Identifikasi permasalahan; mengemukakan tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan.
- 2) Menata agenda formulasi kebijakan; menentukan su apa yang dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan.
- 3) Perumusan proposal kebijakan; mengembangkan proposal kebijakan untuk menangan masalah tersebut.
- 4) Legitimasi kebijakan; memilih satu buah proposal yang di nilai terbaik untuk kemudian mencari dukungan politik agar dapat diterima sebagai sebuah hukum.
- 5) Implementasi kebijakan; mengorganisasikan birokrasi, menyediakan pelayanan dan pembayaran, dan pengumpulan pajak.
- 6) Evaluasi kebijakan; melakukan studi program, melaporkan outputnya, mengevaluasi pengaruh (impact) dan kelompok sasaran dan nonsasaran, dan memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan.

c. Teori Kelompok

Teori pengambilan kebijakan ini mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan (equilibrium). Inti gagasannya adalah interaksi dalam kelompok akan

menghasilkan keseimbangan, dan keseimbangan adalah yang terbaik. Disini individu dalam kelompok-kelompok kepentingan berinteraksi secara formal maupun informal, secara langsung atau melalui media massa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik yang diperlukan. Disini peran dari sistem politik adalah untuk manajemen konflik yang muncul dari adanya perbedaan tuntutan, melalui:

- 1) Merumuskan aturan main antar kelompok kepentingan
- 2) Menata kompromi dan menyeimbangkan kepentingan
- 3) Memungkinkan terbentuknya kompromi dalam kebijakan publik (yang akan dibuat)
- 4) Memperkuat kompromi-kompromi tersebut

Teori kelompok merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang didalamnya beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.

d. Teori Elit

Teori elit berkembang dari teori elit-massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau elit dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Teori ini mengembangkan diri kepada kenyataan bahwa sedemokratis apapun selalu ada bias dalam formulasi kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan

yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elit.

Ada dua pe nilaian dalam pendekatan ini, negatif dan positif. Pada pandangan negatif dikemukakan bahwa pada akhirnya dalam sistem politik, pemegang kekuasaan politiknya yang akan menyelenggarakan kekuasaan sesuai dengan selera dan keinginannya. Dalam konteks ini rakyat dianggap sebagai kelompok yang sengaja dima nipulasi sedemikian rupa agar tidak masuk dalam formulasi kebijakan. Pemilihan umumpun bukan bermakna partisipasi melainkan mobilisasi.

Pandangan positif melihat bahwa seorang elit menduduki puncak kekuasaan karena berhasil memenangkan gagasan membawa Negara bangsa ke kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Pemimpin (elit) pasti mempunyai visi tentang kepemimpinannya, dan kebijakan publik adalah bagian dari karyanya untuk mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan. Soekarno memilih politik sebagai panglima sementara Soeharto memilih ekonomi sebagai panglima. Tidak ada yang secara mutlak keliru, ini hanya masalah profesi dari visi setiap elit serta tentang bagaimana tujuan atau cita-cita bangsa yang sudah disepakati akan dijala ini melalui jalur yang diyaki ninya.

Prosesnya, elit secara top down membuat kebijakan publik untuk diimplementasikan oleh administrasi publik kepada rakyat banyak atau massa. Pendekatan ini dapat dikaitkan dengan paradigma pemisahan

antara politik dengan administrasi publik yang diikonkan dalam konstanta Woodrow Wilson, *where politics end, administrations begin*.

Jadi teori elit merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang kebijakannya merupakan perspektif elit politik. Prinsip dasarnya adalah karena setiap elit politik ingin mempertahankan status quo maka kebijakannya menjadi bersifat konservatif. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para elit politik tidaklah berarti selalu mementingkan kesejahteraan masyarakat.

e. Teori Rasionalisme

Teori ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai *maximum social gain*, yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Teori ini dikembangkan dari teori *cost-benefit analysis*, sebuah teori yang diawali di US Corps and Engines (semacam Departemen Pekerjaan Umum) tahun 1930an dalam rangka membangun bendungan dan jembatan. Tidak dipungkiri, teori ini adalah teori yang banyak diikuti dalam praktek formulasi kebijakan publik di seluruh dunia.

Teori ini mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, teori ini lebih menekankan pada aspek efisiensi atau aspek

ekonomis.

Cara-cara formulasi kebijakan disusun dalam urutan:

- 1) Mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya
- 2) Menemukan pilihan-pilihan
- 3) Me nilai konsekuensi masing-masing pilihan
- 4) Me nilai rasio sosial yang dikorbankan
- 5) Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien

f. Teori inkrementalis

Teori ini pada dasarnya merupakan kritik terhadap teori rasional. Para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang disyaratkan oleh pendekatan rasional karena mereka tidak memiliki cukup waktu, intelektual, maupun biaya, ada keawatiran akan munculnya dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya, adanya hasil-hasil dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan, dan menghindari konflik.

Teori ini berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan dari kebijakan masa lalu. Teori ini juga dapat dikatakan sebagai teori pragmatis/praktis. Pendekatan ini diambil ketika pengambilan kebijakan berhadapan dengan keterbatasan waktu, ketersediaan informasi, dan kecukupan dana untuk melakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif. Pengambilan kebijakan dihadapkan pada ketidakpastian yang muncul disekelilingnya. Pilihannya adalah melanjutkan

kebijakan di masa lalu dengan beberapa modifikasi seperlunya. Pilihan ini biasanya dilakukan oleh pemerintahan yang berada di lingkungan masyarakat yang pluralistik, yang membuatnya tidak mungkin membuat kebijakan baru yang dapat memuaskan seluruh warga. nti dari kebijakan ini adalah berusaha mempertahankan komitmen kebijakan di masa lalu untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai.

g. Teori Pengamatan Terpadu

Teori ini merupakan upaya menggabungkan antara teori rasional dengan teori ncremental. inisiatornya adalah pakar sosiolog orga nisasi, Amitai Etzio ni tahun 1967. a memperkenalkan teori ini sebagai suatu pendekatan terhadap formulasi-formulasi keputusan pokok dan ncremental, menetapkan proses-proses formulasi kebijakan pokok dan urusan tinggi yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar, proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok, dan menjalankan setelah keputusan itu tercapai. Teori ini bisa diibaratkan dengan dua kamera yaitu dengan *wide angle* untuk melihat keseluruhan, dan kamera dengan *zoom* untuk melihat detailnya.

Pada dasarnya teori ini adalah teori yang amat menyederhanakan masalah. Etzio ni pun hanya memperkenalkan dalam sebuah papernya dalah *Admi nistration Review* Desember 1967 dengan judul “*Mixed Scan ning: A Third Approach to Decission Making*”.

h. Teori Demokratis

Beberapa pengajar di Indonesia belakangan ini sering mengolabirasi sebuah teori yang berintikan bahwa pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara dari stakeholders. Teori ini dikatakan sebagai teori demokratis karena menghendaki agar setiap pemilik hak demokrasi diikutsertakan sebanyak-banyaknya.

Teori ini berkembang khususnya di Negara-negara yang baru saja mengalami transisi ke demokrasi seperti Indonesia. Gambaran sederhananya dapat diandaikan dalam sebuah pengambilan keputusan demokrasi dalam teori politik. Teori ini biasanya dikaitkan dengan mplementasi *good governance* bagi pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para konstituten dan pemanfaat diakomodasi keberadaannya.

Teori yang dekat dengan teori pilihan publik ini baik, namun kurang efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang kritis, darurat, dan dalam kelangkaan sumber daya. Namun, jika dapat dilaksanakan teori ini sangat efektif dalam mplementasinya, karena setiap pihak mempunyai kewajiban untuk kut serta mencapai keberhasilan kebijakan, karena setiap pihak bertanggungjawab atas kebijakan yang dirumuskan.

i. Teori Strategis

Pendekatan ini pada ntinya adalah bahwa pendekatan menggunakan runtutan perumusan strategi sebagai basis perumusan kebijakan. Byson mengutip

Olsen dan Eadie untuk merumuskan makna perencanaan strategis, yaitu upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memadu bagaimana menjadi organisasi, mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu.

Perencanaan strategis lebih mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternatif, dan menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang. Perencanaan strategis lebih memfokuskan kepada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu, lebih menekankan kepada penilaian terhadap lingkungan di luar dan didalam organisasi, dan berorientasi pada tindakan.

Proses perumusan strategi sendiri disusun dalam langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis yang meliputi kegiatan
- 2) Memahami manfaat proses perencanaan strategis, mengembangkan kesepakatan awal
- 3) Merumuskan panduan proses
- 4) Memperjelas mandat dan misi organisasi, yang meliputi kegiatan perumusan misi dan mandat organisasi
- 5) Menilai kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman
- 6) Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi
- 7) Merumuskan strategi untuk mengelola isu

j. Teori Permainan

Teori ini biasanya juga disebut sebagai teori konspirasi. Teori permainan sudah mulai mengemuka setelah berbagai pendekatan yang sangat rasional tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang sulit diterangkan dengan fakta-fakta yang tersedia, karena sebagian besar dari kepingan fakta tersebut tersembunyi. Gagasan pokok dari kebijakan dalam teori permainan adalah, pertama, formulasi kebijakan berada dalam situasi kompetisi yang intensif, dan kedua, para aktor berada dalam situasi pilihan yang tidak dependen ke dependen melainkan situasi pilihan yang sama-sama bebas atau independen.

Teori permainan adalah teori yang sangat abstrak dan deduktif dalam formulasi kebijakan. Teori ini mendasarkan pada formulasi kebijakan yang rasional, namun dalam kondisi kompetisi yang tingkat keberhasilan kebijakannya tidak lagi hanya ditentukan oleh aktor pembuat kebijakan, namun juga aktor lain.

Konsep kunci dari teori permainan adalah strategi yang konsep kuncinya bukanlah yang paling optimum namun yang paling aman dari serangan lawan. Jadi didasarnya konsep ini mempunyai tingkat konservatifitas yang tinggi, karena pada intinya adalah strategi defensif. Pendekatan teori permainan ini dapat pula dikembangkan sebagai strategi ofensif terlebih apabila yang bersangkutan berada dalam posisi superior.

Inti dari teori permainan yang terpeting adalah bahwa ia mengakomodasi kenyataan paling riil, bahwa

setiap Negara, setiap pemerintahan, setiap masyarakat tidak hidup dalam vakum. Ketika kita mengambil keputusan maka lingkungan tidak pasif, melainkan membuat keputusan yang bisa menutunkan keefektifan keputusan kita. Disini teori permainan memberikan kontribusi yang paling optimal.

k. Teori Pilihan Publik

Teori kebijakan ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dan individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Akar kebijakan ini sendiri berakar pada teori ekonomi pilihan publik yang mengandaikan bahwa manusia adalah *homo economic* yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan. Pada akhirnya setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus merupakan pilihan dari publik yang menjadi pengguna. Proses formulasi kebijakan publik dengan demikian melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan. Secara umum, ini adalah konsep formulasi kebijakan publik yang paling demokratis karena memberi ruang yang luas kepada publik untuk mengontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan. Sebuah pemikiran yang dilandasi gagasan John Locke bahwa pemerintah adalah sebuah lembaga yang muncul dari kontrak sosial diantara individu warga masyarakat.

Teori ini membantu untuk menjelaskan, kenapa para pemenang pemilu acap kali gagal memberikan yang terbaik kepada masyarakat karena mereka lebih

berkepentingan kepada publiknya yaitu para pemberi suara atau pendukungnya. Teori ini juga membantu kita untuk memahami kenapa kebijakan-kebijakan publik tempatnya selalu tengah-tengah dari kebijakan yang liberal maupun yang konservatif.

Teori kebijakan publik, meski deal dalam konteks demokrasi dan kontrak sosial, namun memiliki kelemahan pokok dalam realitas nteraksi itu sendiri, karena nteraksi akan terbatas pada publik yang mempunyai akses, dan disisi lain terdapat kecenderungan dari pemerintah untuk memuaskan pemilihnya daripada masyarakat luas.

1. Teori Sistem

Pendekatan ini pertama kali dikenalkan oleh David Easton yang melakukan analogi dengan sistem biologi. Pada dasarnya system biologi merupakan proses nteraksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam terminologi ini Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Dalam pendekatan ini dikenal tiga komponen: nput, proses, dan output. Salah satu kelemahan dari pendekatan ini adalah terpusatnya perhatian pada tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah, dan pada akhirnya kehilangan perhatian pada apa yang tidak pernah dilakukan pemerintah.

Jadi, formulasi kebijakan publik dengan teori sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan

hasil atau output dari sistem (politik). Teori ini merupakan teori yang paling sederhana namun cukup komprehensif meski tidak memadai lagi untuk dipergunakan sebagai landasan pengambilan putusan atau formulasi kebijakan publik.

m. Teori Deliberatif

Toeri deliberatif atau musyawarah pada perumusan kebijakan dapat juga dilihat pada bagian analisis kebijakan dengan teori *deliberative policy analysis* di depan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, teori ini dikembangkan oleh Maarten Hajer dan Henderik Wagenaar (2003) dengan mengembangkan konsep ini dari Frank Fischer dan John Forester yang menulis *The Argumentative Turn n Policy Analysis and Planning* (1993). stilah lain yang digunakan adalah *collaborative policy making*. Proses analis kebijakan publik teori musyawarah ini jauh berbeda dengan teori-teori teknokratik, karena peran dari analis kebijakan hanya sebagai fasilitator agar masyarakat menemukan sendiri keputusan kebijakan atas dirinya sendiri.

Peran pemerintah disi ni lebih sebagai legalisator dari kehendak publik. Sementara peran analis kebijakan adalah sebagai prosesor proses dialog publik agar menghasilkan keputusan publik untuk dijadikan sebagai kebijakan publik.

Kebijakan mempunyai tujuan menyelesaikan persoalan yang ada secara tuntas, bukan menyelesaikan persoalan dengan

me nimbulkan persoalan baru, tetapi dengan adanya kebijakan permasalahan yang terselesaikan maka dari itu kebijakan publik harus menjadi solusi dan penyelesaian terhadap persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan publik juga menjadi pilar pembangunan nasional, pe ningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, penguatan ekonomi, budaya, sosial, dan politik.

Kebijakan publik dalam sistem demokrasi harus mencerminkan partisipasi publik, konsistensi pada law enforcement yang berbuara pada keteraturan sosial dan berujung pada kesejahteraan sosial. Kebijakan publik di negara hukum berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum. Meskipun berkaitan dengan dampak luas yang ditimbulkan untuk kepentingan masyarakat, namun kepatuhan terhadap hukum itu penting agar kebijakan tidak melampaui wewenang dan mengambil jarak dengan sewenang wenang.

Pemerintah seringkali memberikan penjelasan yang mengambang, tidak kokoh dan kurang dapat memberikan argumentasi yang berorientasi kepada “mutual benefit” antara Pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima dari sebuah kebijakan. Hal ini yang belakangan ini sering me nimbulkan misinterpretasi terhadap kebijakan-kebijakan baik yang sedang disusun maupun sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Setiap kebijakan dari saat menjadi agenda, perumusan, penetapan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus menjadikan komu nikasi sebagai faktor penting dan berperan sig nifikan. Bagaimanapun, persoalan nformasi, koordinasi, sosialisasi, dan persuasi menjadi contoh bahwa komu nikasi tidak boleh diabaikan dari rangkaian proses pengambilan dan mplementasi kebijakan pemerintah.

Kebijakan publik pasti diikuti oleh reformasi yang melekat dalam aspek aspek kebijakan publik. Reformasi kebijakan yang dibangun dalam penentuan formula kebijakan menjadi titik kunci dari keberhasilan suatu program yang menjadi output dari kebijakan publik. Aspek evaluasi kebijakan publik menjadi ranah bagi aktor kebijakan untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang sudah dilakukan berjalan sesuai plan ning atau mereview kendala kendala yang terjadi selama mplementasi kebijakan.

Formulasi kebijakan, mplementasi kebijakan, maupun evaluasi kebijakan adalah tindakan kebijakan publik yang dilakukan berdasarkan kepentingan terhadap publik, di samping itu untuk membentuk sebuah pencapaian dari kebijakan tersebut agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Maka porsi reformasi kebijakan menjadi penting setelah rekomendasi atau saran dalam evaluasi kebijakan publik.

Reformasi kebijakan melekat dalam proses kebijakan publik. Formulasi kebijakan dilakukan berdasarkan kebutuhan secara langsung atau tidak langsung diawali oleh proses pengamatan, penelitian, pengkajian dan berbagai analisis sebelum rumusan kebijakan itu ditetapkan; mulai dari serap aspirasi masyarakat yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Keinginan secara menyeluruh atas dibuatnya sebuah kebijakan adalah berdasarkan pada kepentingan masyarakat secara nasional. Proses formulasi kebijakan juga salah satunya adalah adanya tuntutan masyarakat kepada pemerintah sebagai bentuk penyampaian kebutuhan bersama.

Reformasi kebijakan bergerak setelah evaluasi kebijakan dilakukan. Apakah kebijakan yang sudah dijalankan dilanjutkan,

dihentikan atau dengan formula yang lain tetapi dengan formula yang sama. Fungsi reformasi kebijakan adalah menentukan program yang sudah dijalankan untuk dilakukan reformulasi kebijakan, sehingga kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu serta menjadi kebijakan publik yang menghasilkan program program yang lebih baik dan berkualitas.

Di samping itu, formulasi kebijakan juga dilakukan dengan berbagai kajian secara ilmiah untuk mengetahui aspek kemanfaatan dan kemudharatan suatu kebijakan. itu semua berangkat dari konsep reformasi yang membutuhkan perbaikan atau perubahan terhadap kebijakan yang sudah ada atau merupakan pengembangan dari kebijakan yang sudah dijalankan. Sehingga dibutuhkan kebijakan baru sebagai bagian dari regulasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Reformasi kebijakan publik tidak berdiri sendiri dalam perubahan dan pembaharuan kebijakannya. Konsep reformasi kebijakan berimplikasi kepada reformasi birokrasi dan reformasi administrasi. Keterkaitan antara ketiga reformasi ini menjadi kondisi yang sangat diharapkan dalam pemerintahan set ini.

Reformasi yang dibangun membentuk sebuah konsepsi dasar yang menjadi tuntutan, aspirasi, maupun temuan secara ilmiah yang selanjutnya akan membentuk kerangka formulasi sebagai dasar bagi pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan publik. Setelah proses reformasi dilakukan dalam formulasi kebijakan maka akan membentuk sebuah formulasi kebijakan yang utuh untuk kemudian ditindak lanjuti sebagai pembuatan kebijakan

Kebijakan sering kali gagal karena tidak disertai dengan formulasi (perencanaan) yang baik, benar, dan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Baik atau tidaknya sebuah perencanaan ditentukan dari apa yang menjadi orientasi kebijakan tersebut, bagaimana proses perumusan formulasi dilakukan, dan siapa yang menjadi subyek dan obyek dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik dipengaruhi oleh unsur dan banyak aspek yang menentukan, mulai dari awal mula sebuah kebijakan akan dilakukan hingga reformasi kebijakan untuk kedapatan kebijakan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan ditopang oleh kebijakan lain yang saling bersentuhan sebagai bagian dari sebuah kebijakan makro. Kebijakan membutuhkan jaringan yang dapat mengomunikasikan antara kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain, sehingga keterkaitan dengan terhadap program yang satu dengan program yang lainnya dapat berkesinambungan dan bersinergi. Oleh karena itu, penting untuk membangun jaringan dalam sebuah kebijakan sebagai bentuk kolaborasi efektif membangun tujuan kebijakan secara nasional maupun internasional.

Kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah kepastian dalam kebijakan publik. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membentuk pemerintahan menjadi lebih baik, yaitu melalui peran aktif dalam berbagai program pemerintah maupun mendukung secara langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan tidak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat sangat menentukan sukses atau tidaknya kebijakan publik. Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi menjadi subjek yang mempunyai peran penting dalam kebijakan.

3. Human Trafficking

Negara berkewajiban memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Upaya pembangunan Negara ini, bertujuan untuk memberikan peluang yang luas bagi rakyat agar mampu meraih kesejahteraan sesuai dengan amanat konstitusi. Wujud nyata pembangunan adalah dengan terselenggaranya infrastruktur seperti dalam pendidikan, lapangan pekerjaan, kesehatan dan sebagainya. Sayangnya, selama 67 tahun kemerdekaan ini, pembangunan yang diselenggarakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat sumber daya manusia, masih banyaknya pengangguran, masyarakat berpendidikan rendah, dan kemiskinan.

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi di dalam maupun lintas batas negara sehingga semakin sulit untuk diprediksi. Hal ini dapat diibaratkan juga seperti fenomena gunung es, terlihat kecil dipermukaan namun besar didasarnya. Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan. Munculnya perdagangan orang seringkali terjadi pada kondisi seseorang yang rentan, diantaranya yang seringkali menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak yang dikategorikan pada kondisi yang lemah. Banyaknya kasus eksploitasi terhadap perempuan dan anak dikarenakan pada alasan posisi para perempuan di keluarga sebagai bukan kepala rumah tangga (dianggap sebagai pengurus rumah), sulitnya mencari pekerjaan dan masalah kemiskinan atau ekonomi dijadikan alasan paling utama sehingga perdagangan orang masih terus meningkat.¹⁴

¹⁴ Rahmah Daniah dan Fajar Apriani, "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional," *Politica* 8, no. 2 (2017): 138.

Pengertian perdagangan orang sampai saat ini masih belum dapat diunifikasikan secara menyeluruh karena dalam beberapa ketentuan dan pendapat memiliki pandangan masing-masing terhadap pengertian perdagangan orang. Pengertian perdagangan orang berfungsi sebagai patokan terhadap suatu perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan yang merupakan perdagangan orang. Pengertian perdagangan orang telah dikemukakan oleh beberapa kalangan. Namun, pengertian tersebut masih terlalu luas, dimana tidak dapat menjadi patokan untuk suatu perbuatan yang dianggap sebagai perdagangan orang. Oleh karena hal tersebut, pengertian perdagangan orang harus jelas dan pasti sehingga pengertian tersebut menjadi suatu patokan dalam menentukan suatu perbuatan merupakan perdagangan orang.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan trafficking sebagai : Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh jin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafficking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).

Perdagangan orang (human trafficking) menurut Definisi dari Pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh¹⁵

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah trafficking merupakan:

- a. "Perdagangan manusia" adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh;
- b. Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam subalinea (a)
- c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai "perdagangan manusia" bahkan jika

¹⁵ Nurkusuma Wardani, Jurnal Ilmiah Trafficking Perempuan dan Anak, H.2

kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam subalinea (a)

- d. “Anak” adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun.

Kasus trafficking in person di Indonesia merupakan akibat tidak hanya dari rendahnya sumber daya orang dan ekonomi melainkan juga akibat adanya krisis hukum. Rendahnya tingkat ekonomi dan kualitas SDM menjadi penyebab maraknya kasus perdagangan orang (trafficking). Banyak masyarakat yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki skill dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bekerja dengan ming-iming akan mendapatkan hasil yang melimpah. Namun tidak disangka, ming-iming yang dijanjikan justru terjebak menjadi korban perdagangan orang. Karena telah menjadi milik nangnya, banyak korban dilakukan secara tidak manusiawi. Inilah gaya perbudakan pada zaman modern. Tidak hanya itu, kasus perdagangan orang juga meliputi penjualan bayi oleh orang tua atau orang lain untuk mendapatkan uang.

Sedangkan Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW) mendefinisikan perdagangan (trafficking): Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan,

dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.

Definisi perdagangan orang (human trafficking) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: Pasal 1 (ayat 1); Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa istilah perdagangan (trafficking) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rekrutmen dan transportasi manusia
- b. Diperuntukkan bekerja atau jasa/melaya ni
- c. Untuk kepentingan pihak yang memperdagangkan

Kasus perdagangan orang pada kenyataannya yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak karena merekalah yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan secara tidak manusiawi, dan dieksplorasi. Bentuk-bentuk eksploitasi sendiri di antaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan

keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang, khususnya perdagangan anak.¹⁶

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan diatas, maka bentuk-bentuk dari human trafficking ini dapat dikalsifikasikan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan tujuan pengirimannya, dapat dibedakan menjadi perdagangan dalam negeri (internal-trafficking) dan perdagangan manusia antar negara/lintas batas (international trafficking);
- b. Berdasarkan korbannya, terbagi kepada perdagangan perempuan, perdagangan anak dan perdagangan pria;
- c. Berdasarkan peruntukannya (eksploitasi), terbagi kepada eksploitasi seksual dan eksploitasi non seksual. Yang dapat digolongkan sebagai bentuk eksploitasi seksual, seperti : Pelacuran secara paksa, Kawin paksa (forced marriages) dan Kawin lewat perantara (mail border Brokered or mail order brides). sedangkan, yang termasuk ke dalam kategori eksploitasi non seksual diantaranya : Kerja paksa (force labor) dan Perdagangan organ tubuh manusia

Modus dan bentuk perdagangan orang menurut Harkristuti Harkrisnowo mengatakan Bahwa beberapa yang dapat dicatat dari temuan dilapangan sebagai berikut:¹⁷

1. Pengiriman TKI keluar negri tanpa adanya dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan

¹⁶ Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, H.5

¹⁷ Harkristuti Harkrisnowo, "Tindak pidana perdagangan orang; Beberapa catatan", Law Review, Vol. 7, Tahun 2007, h.6

dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya “misi kebudayaan”.

2. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual.
3. Penyelenggaraan perkawinan bebrbatas waktu hanya menggalisasi hubungan sesksual yang dimaksudkan untuk jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak) yang biasa dilakukan oleh lelaki pekerja asing dengan perempuan Indonesia.
4. Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan (mail order bride) dan sipengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suaminya.
5. Pertukaran anak-anak untuk menjadi pekerja di Jerman dengan upah yang sangat m inim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, kesehatan mental, serta moral mereka.
6. Pengangkatan anak atau bayi yang dilakukan tanpa Proses yang benar (due process of law).

Harkristuti Harkrisnowo memperoleh data tentang bentuk-bentuk perdagangan orang di Indonesia antara lain Perdagangan perempuan dan anak-anak untuk dijadikan sebagai pekerja dalam rumah tangga; orang-orang tersebut dijadikan pekerja yang dimana bekerja di klub-klub malam atau di tempat yang lain sama persis dan dijadikan sebagai model, artis, penyanyi ataupun bisa dijadikan sebagai pelacur pada industri pornografi, dan juga secara paksa mereka dipaksa untuk menjual obat-obatan terlarang yang dimana barang tersebut bisa

membuat orang menjadi mabuk. Banyak sekali korban perdagangan seksual yang bekerja di luar negeri seperti kawin kontrak, eksploitasi anak yang bertujuan untuk menjadikan anak tersebut menjadi pengemis, dan juga perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi ataupun penculikan wanita hamil yang dimana peminjaman uang kepada para orang tua yang tidak mungkin bisa dikembalikan dan harus memberikan bayi yang ada dalam kandungan. , serta praktik penyamaran sebagai dokter rumah sakit.¹⁸

Banyak sekali modus operandi tampak tidak berbeda jauh dengan operandi perdagangan orang yang dimana di berbagai negara dengan penipuan dengan berkedok penawaran yang kerja yang tidak berat dan di ming-imingi uang atau bayaran yang sangat tinggi dan untuk mendapatkan korban merupakan salah satu modus operandi yang dimainkan ataupun dilakukan oleh para pelaku.

Sindikatan ini juga tersusun secara teratur dan memiliki hirarki, dimana masing-masing, seperti sebagai penerima, pemalsu dokumen, penyedia dokumen, pengantar atau sebagai Organizer³⁵ . Beberapa faktor kejahatan perdagangan orang sebagai kejahatan yang terorganisir seperti jumlah persaingan dengan orang lain strategi dan juga harga serta strategi pemasaran yang dimana sudah berorganisasi yang berbeda dengan tindakan-tindakan yang diaman disertai ancaman. Dalam kegiatan yang perdagangan narkoba sering ditemukan beberapa kasus.

Maka dari itu di Asia tampak pada kegiatan yang dimana organisasi kriminal yang menggunakan alat dan juga metode

¹⁸ Harkristuti Harkrisnowo, Indonesia Court Report: Human Trafficking, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta, 2003, h.44-46

transportasi yang dimana sering kali digunakan untuk perdagangan orang maupun perdagangan narkoba. Dalam pemburuan di pasar gelap lebih jauh sindikat ini memanfaatkan secara sistematis eksploitasi dalam hubungannya, seperti adanya praktik-praktik prostitusi dinegara tujuan. Kegiatan Saat ini jarang mereka melakukannya dalam kegiatan yang legal, seperti kegiatan sebagai agen perjalanan sekolah, bahasa, dan perusahaan dan bongkar muat barang untuk memfasilitasi kegiatan mereka, mengumpulkan keuntungan dan mencuci uang. Melihat berbagai konteks yang terkait dengan kejahatan dalam kasus perdagangan orang, ada hubungan yang erat antara perdagangan orang di satu sisi dan hak asasi manusia di sisi yang lain Tom Obokata menyatakan bahwa kita dengan mudah menghubungkan perdagangan orang dan hak asasi manusia karena pada kenyataannya beberapa orang dipaksa ditipu untuk masuk kedalam proses perdagangan orang dan mereka pun dieksploitasi secara seksual oleh pelaku dalam mewujudkan tujuannya³⁷. Tentu hal itu semua merupakan bentuk nyata kejahatan Hak asasi Manusia.¹⁹

¹⁹ Tom obokata, "Human Trafficking, Rights and the Nationality, Immigration and Asylum Act", *Europaan Human Rights Law Review*, Vol. 4 Tahun 2003 h. 411.

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Teknik Penggalan Data

Pengertian Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Pengertian metode penelitian menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Nasir. Nasir menjelaskan bahwa metode dari penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan & menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Pengertian menurut para ahli yang kedua yaitu menurut Winarno. Winarno menjelaskan bahwa metode dari penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yg teliti & sistematis.

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Menurut Prof. M.E Winarno, metodologi penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang cermat dan sistematis.

Menurut Muhammad Nasir, metodologi penelitian merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan, serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang diajukan.

Menurut Muhiddin Sirat, metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk memilih subjek masalah dan menentukan pada judul dalam sebuah nvestigasi.

Menurut Heri Rahyubi, metodologi penelitian adalah sebuah model yang dapat digunakan dengan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai sebuah proses dalam pembelajaran tersebut dengan baik.

B. Desain Penelitian

Penelitian ni didesain dengan menggunakan metode penelitian gabungan, normative-empiris. Maksud penelitian ni yakni, menggabungkan antara metode penelitian hukum normatif yang memiliki kecenderungan pada aspek studi pustaka, penelaahan terhadap beberapa kitab hukum yang berkaitan dengan penelitian. Pengertian desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian.

Selain pengertian tersebut, juga bisa didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien.

1. Silaen (2018: 23)

Menurut Silaen desain penelitian adalah desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

2. Umar (2007, hal 6)

Menurut para ahli desain penelitian dapat diartikan sebagai

suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antara variabel secara komprehensif sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset. Rencana tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan preset, mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai analisis akhir

3. Nachmias dan Nachmias (1976),

Menurut Nachmias dan Nachmias (1976), desain penelitian adalah suatu rencana yang membimbing peneliti dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi observasi. Maksudnya, suatu model pembuktian logis yang memungkinkan peneliti untuk mengambil inferensi mengenai hubungan kausal antar variabel di dalam suatu penelitian.

Selain itu pula, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empirisme yang lebih menekankan pada penelitian lapangan (field research), sebagai upaya pencarian data dan fakta peneliti di lapangan yang berhubungan dengan topik penelitian.

C. Jenis Penelitian

Jenis-jenis penelitian secara garis besar digolongkan menjadi dua macam yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pembagian jenis penelitian secara lebih kompleks antara lain penelitian deskriptif, korelasional, evaluasi, simulasi, survei, studi kasus, etnografi, cultural dan masih banyak lagi yang dijelaskan dalam artikel ini.

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kelamahan (natural setting) obyek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (basic research), penelitian

terapan (applied research) dan penelitian pengembangan (research and development). Selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiahannya, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi penelitian eksperimen, survey, dan naturalistik.”²⁰

Berdasarkan objek penelitian dan tingkat kealamiahannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif studi kasus yaitu tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Studi kasus bisa dilakukan terhadap individu, seperti yang lazimnya dilakukan oleh para ahli psikologi analisis, juga bisa dilakukan terhadap kelompok, seperti yang dilakukan oleh antropologi, sosiologi, dan psikologi sosial.²¹

Tujuan penelitian studi kasus adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.³ Setiap analisis kasus mengandung data berdasarkan wawancara, data berdasarkan pengamatan, data dokumentasi, kesan dan pernyataan orang lain mengenai kasus tersebut. Khusus mengenai individu, datanya dapat mencakup catatan klinis, data statistik, mengenai orang yang bersangkutan, informasi mengenai latar belakangnya, profil riwayat hidup, dan catatan hariannya²²

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, yakni data dan fakta penelitian lapangan didapatkan dalam bentuk persepsi, pendapat, fakta peristiwa ataupun bentuk lainnya yang tidak berbentuk angka. Namun, peneliti pula berpandangan bahwa data yang bersifat kuantitatif pada satu waktu dalam penelitian ini akan dibutuhkan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 4.

²¹ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 23

²² Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, h. 202

sebagai bentuk penyempurna hasil penelitian agar mencapai tingkat akurasi data yang lebih pasti.

Studi kasus merupakan bagian dari penelitian kualitatif, Ciri-ciri penelitian studi kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir baik mengenai unit tersebut. Tergantung kepada tujuannya, ruang lingkup penelitian ni mencakup keseluruhan siklus kehidupan/ hanya segmen-segmen tertentu saja, studi demikian mungkin mengkonsentrasikan diri pada faktor-faktor khusus tertentu atau dapat pula mencakup keseluruhan faktor-faktor dan kejadian-kejadian

D. Sifat Penelitian

Penelitian ni bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai objek penelitian, dapat berupa manusia atau gejala dan fenomena sosial tertentu. yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan bahan yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ni adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan halhal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.²³ Penelitian ni bersifat deskriptif karena penelitian ni semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum

²³ Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7

E. Pendekatan Penelitian

Ada banyak pendekatan yang peneliti lakukan dalam melaksanakan penelitian ini, kemungkinan beberapa pendekatan penelitian akan digunakan, sebut saja beberapa pendekatan yang cenderung akan peneliti gunakan, diantaranya : pertama, pendekatan studi peraturan perundang-undangan (statute approach) dan kedua, pendekatan studi kasus (The Case Approach). Kedua pendekatan tersebut peneliti gunakan secara bersamaan sekaligus, yakni dengan cara menelaah serta mengkaji berbagai literatur ketentuan peraturan perundang- undangan sekaligus melakukan perbandingan terhadap beberapa kasus yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap sebelumnya, dan tentu yang berkaitan dengan su yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan.

F. Sumber Data Penelitian

Beberapa jenis data yang akan didapatkan oleh peneliti, terbagi atas:

1. Data primer, yakni data utama yang didapatkan dari hasil pengumpulan data secara langsung dari lapangan, diantaranya didapatkan dengan cara observasi, wawancara atau bahkan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang lainnya;
2. Data sekunder, yakni data tambahan yang peneliti dapatkan dari berbagai literatur hukum, tulisan-tulisan ataupun draft kajian yang berkaitan dengan su penelitian, data sekunder berfungsi sebagai penjelas atau penguat terhadap data utama/primer yang telah didapatkan oleh peneliti;
3. Bahan hukum tersier, yakni data penunjang yang peneliti dapatkan dari berbagai sumber, semacam kamus, komentar

atau pendapat yang berhubungan dengan su penelitian. Tujuan penggunaan data ni adalah sebagai data penunjang terhadap kedua data yang terlebih dahulu didapatkan, yakni data primer dan sekunder.

G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ni peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ni merupakan pengumpulan data dan nformasi untuk menggambarkan suatu keadaan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala yang terjadi tanpa rekayasa saat penelitian berlangsung. Melalui pendekatan deskriptif inilah diperoleh data dan nformasi sebanyak-banyaknya mengenai layanan nformasi tentang dampak smartphone terhadap prestasi belajar dilingkungan sekolah. Analisis data kualitatif adalah bersifat nduktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara nteraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

Pada tahap analisis data ni peneliti akan menempuh beberapa tahapan pengolahan data terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Klasifikasi, yakni melakukan pengurutan atau pemilahan data sesuai dengan type dan model data penelitian;
2. Kualitatif, berhubung jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Peneliti melakukan langkah kualitatif terhadap data-data yang didapat agar mudah dalam melakukan analisis selanjutnya;
3. Analisis, selanjutnya analisis yang digunakan oleh peneltia adalah penalaran (logika) deduktif, yakni penalaran yang

berangkat dari pemahaman umum ke arah pemahaman khusus agar didapatkan hasil data yang spesifik dan riil.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Barat

Kesejahteraan sosial merupakan satu hal yang harus diwujudkan oleh negara bagi penduduknya. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. menggambarkan bahwa penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional yang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah dan berkelanjutan. Halini mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terpadu.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa tidak semua PMKS dapat me nikmati hasil pembangunan dan hidup secara layak, berkualitas serta bermartabat. Masih banyak masyarakat dalam rentang perjalanan kehidupannya mengalami kesulitan, hambatan dan permasalahan yang menghambat keberfungsian sosialnya secara layak, bermartabat dan mampu mengembangkan diri.

Disisi lain, penanganan PMKS belum terlaksana secara optimal dan telah menjadi su bersama baik permasalahan nternal maupun eksternal dari PMKS tu sendiri. Faktor nternal yang dirasakan PMKS adalah ketidakberdayaannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta pemanfaatan dalam mengakses sistem-

sistem sumber yang ada secara normatif. Sedangkan faktor eksternal adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat dan belum optimal pemerintah dalam penanganan permasalahan PMKS yang berada di masyarakat.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasma ni, roha ni dan sosial) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan pengertian dan kriteria sebagai berikut :²⁴

1. Anak balita telantar

Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria :

²⁴ Editor, “Sinergisitas Penanganan Penyandang Masalah Sosial Keterlantaran Di Kabupaten Agam Yang Humanis” pada <https://bpsdmd.jatengprov.go.id/eproper/inovasi.php?id=139>, diakses pada 10 Oktober 2021

- a. Terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
- b. Berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
- c. Kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
- d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
- e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
- f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

2. Anak terlantar

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

- a. Berasal dari keluarga fakir miskin;
- b. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
- c. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang

menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a. Disangka;
- b. Didakwa; atau
- c. Dijatuhi pidana

4. Anak jalanan

Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- a. Menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
- b. Mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)

Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
- b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
- c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
- d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

- a. Anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
- c. Pernah dia niaya dan/atau diperkosa; dan
- d. Dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)

7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus

Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan,

menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria :

- a. Berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. Dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- c. Korban perdagangan manusia;
- d. Korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
- e. Korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
- f. Dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- g. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- h. Terinfeksi HIV/AIDS.

8. Lanjut usia telantar

Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan

- b. Terlantar secara psikis, dan sosial.

9. Penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan halini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

- a. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- b. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- e. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
- f. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

10. Tuna Susila

Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan mbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

- a. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung

seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek;
dan

- b. Memperoleh mbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

- a. Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. Tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. Tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

12. Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

- a. Mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. Berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. Berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- d. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

13. Pemulung

Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Kriteria :

- a. Tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
- b. Mengumpulkan barang bekas.

14. Kelompok Minoritas

Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria :

- a. Gangguan keberfungsian sosial;
- b. Diskriminasi;
- c. Marginalisasi; dan
- d. Berperilaku seks menyimpang.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga

mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

- a. Seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- b. Telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
- c. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
- d. Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
- e. Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

- a. Seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
- b. Telah terinfeksi HIV/AIDS.

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA

Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria :

- a. Seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
- b. Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
- c. Tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

18. Korban trafficking

Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kriteria :

- a. Mengalami tindak kekerasan;
- b. Mengalami eksploitasi seksual;
- c. Mengalami penelantaran;
- d. Mengalami pengusiran (deportasi); dan
- e. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

19. Korban tindak kekerasan

Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. Mengalami perlakuan salah;
- b. Mengalami penelantaran;
- c. Mengalami tindakan eksploitasi;
- d. Mengalami perlakuan diskriminasi; dan
- e. Dibiarkan dalam situasi berbahaya.

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran nternal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. Pekerja migran domestik;
- b. Pekerja migran lintas negara;
- c. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara;

- d. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. Pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
- f. Pekerja migran miskin;
- g. Mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - 1) Tindak kekerasan;
 - 2) Eksploitasi;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Pengusiran (deportasi);
 - 5) Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 - 6) Mengalami trafficking.

21. Korban bencana alam

Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. Korban terluka atau meninggal;
- b. Kerugian harta benda;
- c. Dampak psikologis; dan

- d. Terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

22. Korban bencana sosial

Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. Korban jiwa manusia;
- b. Kerugian harta benda; dan
- c. Dampak psikologis.

23. Perempuan rawan sosial ekonomi

Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa belum menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

- a. Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
- c. Menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
- d. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

24. Fakir Miskin

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria :

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
- b. Mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

25. Keluarga bermasalah sosial psikologis

Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria :

- a. Suami atau stri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomu nikasi;
- b. Suami dan stri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam katan keluarga;
- c. Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomu nikasi; dan
- d. Kebutuhan anak baik jasma ni, roha ni maupun sosial kurang terpenuhi.

26. Komunitas Adat Terpencil

Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Kriteria :

- a. Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;
- b. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- c. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- d. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
- e. Peralatan dan teknologinya sederhana;
- f. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan
- g. Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

1. Indikator Besaran Permasalahan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan output atau capaian akhir yang diharapkan terwujud dalam upaya atau proses pembangunan suatu daerah ataupun Negara. Fungsi dari pemerintahan salah satunya adalah sebagai jalan atau media mewujudkan kesejahteraan sosial melalui program-program penyelenggaraan pemerintahan yang telah dirumuskan dan disusun sedemikian rupa ke dalam dokumen rencana strategis (Resntra).

Rencana strategis pemerintahan daerah yang biasa dikenal dengan istilah RPJMD merupakan singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen

perencanaan pembangunan daerah lima tahunan atau satu periode kekuasaan pemerintah daerah. RPJMD ini dibuat oleh pemerintah daerah secara bersama-sama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan para pihak terkait lainnya. Rencana strategis yang dimuat ke dalam RPJMD berupa program-program kerja atau ancap-ancang program pemerintah daerah yang dirumuskan dan disusun secara sistematis dengan memperhatikan penjabaran dari visi dan Misi yang diusung oleh seorang kepala daerah ketika mencalonkan diri pada kontestasi pemilihan kepala daerah sebelumnya.

Selanjutnya, diakhir pelaksanaan renstra tersebut diakhiri dengan pelaporan kinerja yang didokumentasikan ke dalam dokumen laporan atau yang disebut dengan Laporan Kinerja instansi Daerah (LKIP). Laporan kinerja tersebut berisi tentang capaian-capaian kinerja atau program antara target dan realisasi, dengan memperhatikan aspek penggunaan sumber daya, efektifitas dan efisiensi serta mengemukakan berbagai faktor pendukung ataupun penghambat dalam pelaksanaan program kerja daerah tersebut.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dengan berpedoman pada rencana-rencana yang telah ditetapkan biasanya akan dilakukan review dan analisis data serta dilakukan publikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) daerah yang terkait. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak bisa dilakukan secara menyeluruh sekaligus, sebab hal ini akan menyulitkan dalam menilai aspek-aspek dalam pembangunan suatu daerah yang sangat bersifat parsial.

Dalam penelitian yang dilaksanakan ini, peneliti mengambil sampling 4 kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya perbandingan antara Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Adapun

gambaran secara umum berkenaan dengan daerah sampling tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kabupaten Garut

Kabupaten Garut yang secara geografis berdekatan dengan Kota Bandung sebagai bukota provinsi Jawa Barat, merupakan daerah penyangga dan hinterland bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Oleh karena itu, Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga Kota dan Kabupaten Bandung sekaligus pula berperan di dalam mengendalikan keseimbangan lingkungan.

Kabupaten Garut merupakan bagian dari wilayah bagian Provinsi Jawa Barat yang secara definitif menjadi Daerah Tingkat I berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2008. Secara geografis Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6 05'49" – 7 0 45'00" Lintang Selatan dan 107 0 25'8" – 108 0- 7'30 Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayahnya,

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Sumedang,
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudra Indonesia,
3. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Cianjur.

Secara administratif, Kabupaten Garut mempunyai luas 307.407 ha atau $\pm 8,28\%$ dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat yang terbagi dalam 42 kecamatan dan 422 desa dan 21 kelurahan.

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Cibalong dengan luas 21,359 ha atau 6,97% dari luas Kabupaten Garut Sedangkan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Kersamanah dengan luas 1,650 ha atau 0,54% dari luas Kabupaten Garut.

Adapun jumlah sebaran penduduk di Kabupaten Garut berdasarkan data pada tahun 2019 adalah sebanyak 2,284,418 yang terbagi kepada jenis kelamin laki-laki sebanyak 1,168,329 dengan prosentase 51.14% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 1,116,089 dengan prosentase 48.86%. Selanjutnya, mata pencaharian penduduk kabupaten Garut rata-rata di dominasi oleh oleh sector pertanian, mengingat tingkat kesuburan lahan di wilayah tersebut yang cukup baik, selain tu pula Garutini terkenal dengan olahan hasil kerajinan dari kulit domba berupa jaket, sepatu dan lain-lain.

b. Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Semenjak berdiri pada tahun 2001 telah terjadi beberapa perkembangan atau perubahan wilayah administrasi dan luas wilayahnya. Pada tahun 2001, luas wilayah Kota Tasikmalaya yang telah disahkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah 171,56 km², yang terbagi ke dalam 8 (delapan) kecamatan yang memiliki 15 kelurahan dan 54 desa. Pada tahun 2003, terjadi perubahan status 54 desa menjadi kelurahan melalui Perda Kota Tasikmalaya No. 30 Tahun 2003 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan.

Perkembangan Kota Tasikmalaya yang pesat dan adanya tuntutan akan peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga pada tahun 2008 dilakukan pemekaran kecamatan, yang semula 8 (delapan) kecamatan menjadi 10 (sepuluh)

kecamatan, sesuai Perda Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Purbaratu. Pada tahun 2010, luas wilayah Kota Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dilakukan pengukuran. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Kota Tasikmalaya memiliki luas 183,85 km², dan hal tersebut telah ditetapkan dalam Perda Kota Tasikmalaya No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

Secara geografis Kota Tasikmalaya terletak antara 108°08'38" Bujur Timur 108°24'02" Bujur Timur dan antara 7°10' Lintang Selatan -7°26'32" Lintang Selatan. Kota Tasikmalaya merupakan posisi strategis di bagian tenggara wilayah Propinsi Jawa Barat, karena sebagai penghubung dan sekaligus pusat wilayah atau daerah priangan timur.

Kedudukan atau jarak Kota Tasikmalaya dari bukota Propinsi Jawa Barat, yaitu Bandung, ± 105 Km dan dari bukota negara, yaitu Jakarta, ± 255 Km. Kota Tasikmalaya secara administrasi berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten lainnya, yaitu:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Cisayong, Sukaratu) dan dengan Kabupaten Ciamis (Kecamatan Sindangkasih, Cikoneng, Cihaurbeuti), dengan batas fisik Sungai Citanduy;
2. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Jatiwaras dan Sukaraja);
3. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Sukaratu, Leuwisari, Singaparna, Sukarame, Sukaraja) dengan batas fisik Sungai Ciwulan;
4. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten

Tasikmalaya (Kecamatan Manonjaya dan Gunung Tanjung) dengan batas fisik saluran rigasi Cikunten I dan Sungai Cileuwimunding.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031, luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya adalah 18.385,07 Ha (183,85 Km²), terdiri dari 10 Kecamatan dengan 69 Kelurahan. Tasikmalaya dikenal sebagai Kota Santri, khususnya di era sebelum 1980-an karena hampir di seluruh wilayah tersebar pondok pesantren yang mengajarkan agama Islam, baik pondok besar maupun kecil, bahkan melahirkan tokoh perjuangan nasional di antaranya adalah Zainal Mustafa.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 719.882 jiwa. Hampir 70%, pusat bisnis, pusat perdagangan dan jasa, dan pusat industri di priangan timur dan selatan berada di Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa di wilayah provinsi Jawa Barat. Bidang-bidang yang sangat potensial di Kota Tasikmalaya diantaranya adalah bidang perhotelan, perbankan, pusat perbelanjaan baru, pusat pendidikan, pusat wisata belanja dan pusat industri. Kota Tasikmalaya memiliki berbagai macam potensi, salah satunya yaitu potensi industri bordir yang sudah mendunia.

c. Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara 107°30' – 107°40' Bujur Timur dan 6°25' – 6°45' Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor. Luas wilayah Kabupaten Purwakarta adalah 97.172 hektar atau 971,72 km² .

Secara geografis Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Purwakarta tepatnya pada tanggal 1 Januari 2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2001 telah terjadi restrukturisasi organisasi pemerintahan di Kabupaten Purwakarta. Secara administratif, wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa dan 9 kelurahan, 475 dusun, 1.084 Rukun Warga (RW), dan 3.455 Rukun Tetangga (RT).

Kepadatan penduduk di Kabupaten Purwakarta 1.032 orang per Km², berdasarkan kelompok umur dari data Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, penduduk di Kabupaten

Purwakarta cenderung didominasi oleh kelompok umur muda. Salah satu pendekatan untuk menganalisis kependudukan adalah berdasarkan pada kelompok umur, artinya melihat jumlah penduduk berdasarkan umur strategis masing-masing. Dalam hal ini untuk membedakan penduduk berdasarkan usia produktif dan non produktif. Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Purwakarta didominasi oleh sektor pertanian dan wirausaha lainnya.

d. Kabupaten Subang

Wilayah Kabupaten Subang secara geografis terletak di bagian utara Propinsi Jawa Barat dengan batas koordinat yaitu antara 107° 31' - 107° 54' Bujur Timur dan 6° 11' - 6° 49' Lintang Selatan.

Luas Wilayah Kabupaten Subang adalah 205.176 hektar atau sekitar 6,34 persen dari luas Propinsi Jawa Barat, sedangkan range ketinggian tempat antara 0 – 1500 m dpl (di atas permukaan laut). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang, batas wilayah administratif Kabupaten Subang terletak pada :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa ▪ Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bandung
2. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Karawang
3. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan Sumedang.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang per Juni 2018 jumlah penduduk Kabupaten Subang sebanyak 1.560.293 dengan jumlah Laki-laki 784.688 dan

jumlah Perempuan 775.605. Sebagian besar penduduk subang memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh perkebunan, sisanya bagi masyarakat yang hidup di wilayah pantai memiliki profesi sebagai nelayan.

Berkaitan dengan hal ini setidaknya, peneliti menggunakan 3 (tiga) indikator yang dapat dihubungkan dengan topik atau permasalahan yang diteliti, untuk diperoleh tingkat kompleksitas atau kerentanan suatu permasalahan yang diteliti pada suatu daerah tersebut. Adapun indikator tersebut, yakni :

a. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (1990) pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama, pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan; sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/keterampilan mereka tersebut. Konsep pembangunan ini jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), kebutuhan dasar (*basic needs*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dan pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*). Empat unsur utama yang terkandung dalam paradigma Pembangunan Manusia tersebut adalah produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi pelaku atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam kaitan ini, UNDP melihat pembangunan manusia sebagai macam “model” pembangunan

tentang penduduk, dan oleh penduduk, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tentang penduduk; berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya.
- b. Untuk penduduk; berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan (pertumbuhan ekonomi dalam negeri).
- c. Oleh penduduk; penduduk dalam menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan.

Untuk mengukur tingkat pemenuhan ke-tiga unsur diatas, UNDP menyusun suatu indeks komposit berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu: angka harapan hidup (*life expectancy at age 0 : eo*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate : lit*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling : MYS*) dan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*) – yang merupakan ukuran pendapat yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli. indikator pertama mengukur “umur panjang dan sehat”, dua indikator berikutnya mengukur “pengetahuan dan keterampilan”, sedangkan indikator terakhir mengukur kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Ketiga indikator inilah yang digunakan sebagai komponen dalam penyusunan HDI yang dalam publikasi ini diterjemahkan menjadi PM.

Berdasarkan perhitungan PM dapat digambarkan bahwa negara yang baik adalah negara yang penduduknya mempunyai tingkat kesehatan yang baik, pemikiran yang cerdas, dan kekuatan daya beli yang baik. PM bukan ukuran yang menyeluruh mengenai pembangunan manusia, sehingga perlu dilengkapi dengan indikator lainnya yang jumlahnya masih banyak (Ananta 1996, Agung 1997).

ndeksini memang tidak melihat pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, angka kematian, status gizi, mu nisasi, akses ke media masa, kematian maternal, angka prevalensi kontrasepsi, dan sebagainya. ndeksini memang hanya disusun dari tiga indikator dasar yang data umumnya umumnya tersedia di setiap negara sehingga bisa diperbandingkan.

Walaupun terjadi perubahan-perubahan berupa berbagai penambahan atau penyesuaian, prinsip dasar pengukuran PM tetap sama. Pada ntinya, kesehatan diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir, pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf dewasa yang memiliki timbangan $\frac{2}{3}$ dan *erollment ratio* untuk pendidikan dasar, menengah, dan atas yang memiliki timbangan $\frac{1}{3}$, serta pendapatan per kapita yang diukur dengan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Pada PM sebelumnya, pendidikan diukur dengan tahun sekolah, namun karena variabelini tidak selalu tersedia di setiap negara, lalu diganti dengan *enrollment ratio*.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka langkah awal yang peneliti lakukan adalah dengan mencari data PM yang ada pada kabupaten/kota objek penelitian. Oleh karena tu, berdasarkan sumber yang didapatkan peneliti dari Badan Pusat Statistik maka dapat dijabarkan tingkat PM adalah sebagai berikut :²⁵

Tabel 1

Wilayah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia		
	2018	2019	2020
Provinsi Jawa Barat	71.30	72.03	72.09
Garut	65.42	66.22	66.12
Kota Tasikmalaya	72.03	72.84	73.04
Subang	68.30	68.69	68.95
Purwakarta	69.98	70.67	70.82

²⁵ Badan Pusat Statistik : <https://bps.go.id/indicator/26/36/1/indeks-pembangunan-manusia.html> Access Time: November 17, 2021, 11:58

Data yang tersaji pada table tersebut menunjukkan kepada kita bahwa tingkat PM secara keseluruhan pada level provinsi maupun kabupaten kota cenderung terus mengalami peningkatan berdasarkan data tahun 2018-2020. Kelisih kenaikan PM pada tingkat provinsi berbeda-beda setiap tahunnya, kenaikan pada tahun 2018 ke tahun 2019, kenaikan berada pada angka 0.73% sedangkan kenaikan pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan hanya bisa mencapai angka 0,06%.

Selanjutnya, pada tingkat kabupaten/kota pun mengalami hal yang serupa. Kenaikan PM sangat bervariasi pada setiap tahunnya menunjukkan kenaikan PM pada tahun ketiga mengalami kenaikan yang cenderung kecil jika dibandingkan kenaikan pada tahun sebelumnya. Pada kabupaten Garut, kenaikan PM pada tahun 2018 ke 2019 menyentuh angka 0,8% sedangkan pada tahun 2019 ke tahun 2020 PM di kabupaten Garut ini justru mengalami penurunan sebesar 0,1%.

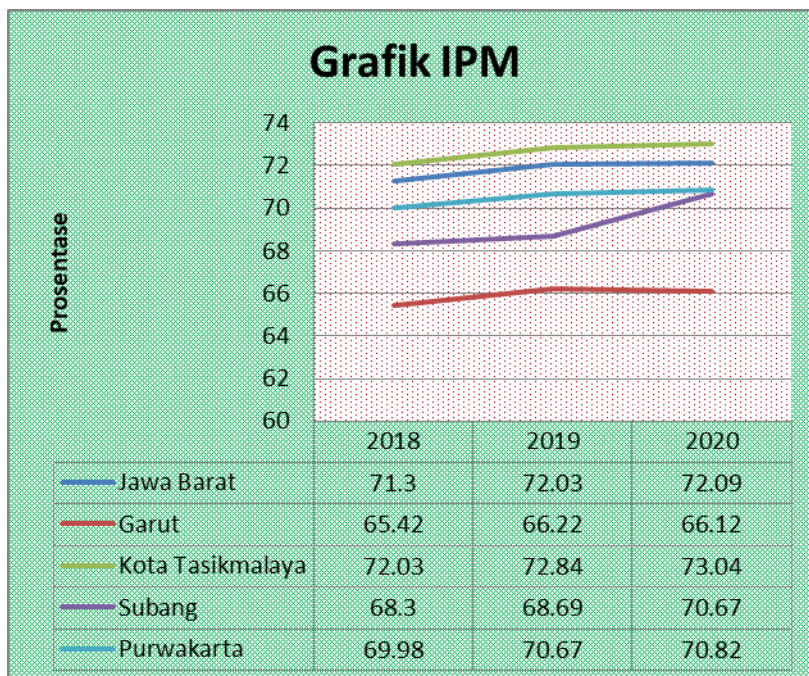
Grafik perkembangan PM di kota Tasikmalaya pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,81% sedangkan pada tahun 2019 ke tahun 2020 kenaikan tersebut hanya bisa menyentuh angka 0,2%, artinya kenaikan pada tahun ketiga perkembangan PM di kota Tasikmalaya memang mengalami kenaikan tapi tidak sebesar pada tahun sebelumnya.

Di kabupaten Subang grafik perkembangan PM dari tahun 2018 ke tahun 2019 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 kenaikan tersebut menyentuh angka 0,39% sedangkan pada tahun 2019 ke tahun 2020 menunjukkan kenaikan PM tersebut lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mampu menyentuh angka 0,26%.

Terakhir, progress atau perkembangan PM di kabupaten Purwakarta juga menunjukkan data kenaikan pada setiap tahunnya.

Akan tetapi, kenaikan tersebut mengalami hal yang serupa dengan beberapa kabupaten/kota lainnya. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 kenaikan PM di kabupaten Subang mencapai angka 0,69% sedangkan pada tahun selanjutnya hanya menyentuh selisih angka kenaikan pada 0,15% yang telah mengalami selisih kenaikan lebih sedikit jika dibandingkan dengan selisih angka kenaikan pada tahun sebelumnya. Secara grafik tingkat perkembangan PM tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 1



Berdasar pada data yang tertera pada table diatas, maka dapat diasumsikan bahwa perkembangan PM pada tahun 2019 cenderung berada pada tingkat stabilitas yang cukup baik, jika dibandingkan kenaikan PM yang terjadi pada tahun 2020 pada setiap kabupaten/kota atau bahkan pada tingkat provinsi tu sendiri. Hal tesebut dibuktikan dengan adanya penurunan selisih angka kenaikan PM pada tahun 2020 dan bahkan ada yang mengalami penurunan

seperti yang terjadi pada kabupaten Garut.

Artinya, proses perkembangan PM pada tahun 2020 ini dapat dikatakan telah mengalami problem dan harus dilakukan pengecekan serta penyelesaian permasalahan (*Troubleshoot*). Indeks Pembangunan Manusia ini menjadi alarm yang sangat penting untuk mengenali ada ketidakberesan yang terjadi pada suatu wilayah atau daerah terkait dengan keadaan suatu masyarakat yang menjadi penduduknya. Suatu permasalahan yang dimaksud tersebut bisa beraneka ragam, namun biasanya PM ini dikaitkan dengan aspek kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi merupakan salah satu aspek penting di dalamnya.

Maka, berdasarkan faktor tersebut peneliti menilai proses *human trafficking* akan sangat berpotensi terjadi, sebab ekonomi juga merupakan salah satu dasar atau latar belakang yang sangat berpengaruh dalam menyumbang angka dengan posisi tertinggi terkait dengan alasan terjadinya tindak pidana kejahatan luar biasa tersebut. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk menguji perbandingan tingkat kabupaten/kota pada tahun yang sama. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :²⁶

Tabel 2

Urutan Ke -	Wilayah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia
		2018-2020
1	Kota Tasikmalaya	72.64
2	Purwakarta	70.49
3	Subang	69.22
4	Garut	65.92

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik

²⁶ Badan Pusat Statistik : <https://bps.go.id/indicator/26/36/1/indeks-pembangunan-manusia.html> Access Time: November 17, 2021, 11:58

perihal keadaan PM pada 4 (empat) kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian dalam rentang 3 tahun terakhir, antara 2018-2020. Maka, didapatkan kesimpulan bahwa Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat PM tertinggi dengan rata-rata berada pada angka 72,64% dengan kategori PM menengah ke atas.

Selanjutnya posisi kedua diisi oleh kabupaten Purwakarta dengan rata-rata PM berada pada angka 70,49% yang termasuk dalam kategori PM menengah ke atas. Sedangkan untuk posisi ketiga ada kabupaten Subang dengan rata-rata 69,22% masih termasuk ke dalam kategori kategori PM menengah ke atas. Terakhir, kabupaten Garut sebagai daerah yang memiliki rata-rata PM pada angka 65,92% masih termasuk ke dalam kategori PM menengah ke atas.

Dalam hal ini, tim peneliti telah bersepakat bahwa faktor pendidikan merupakan satu-satunya indikator yang paling berpengaruh dalam menentukan keadaan PM pada suatu wilayah atau daerah. Sebab dalam dunia pendidikan semua aspek bermula dan sekaligus bermuara, baik itu aspek sosial, ekonomi, kesehatan, politik dan yang lainnya. Ukurannya adalah jika tingkat pendidikan suatu masyarakat tersebut baik, maka perkembangan PM tersebut akan cenderung mengalami kenaikan dan sebaliknya begitu pula.

Terlepas dari pada itu, peneliti pun tidak menafikan terkait dengan pola dan sistem pendidikan yang ada seringkali mengalami perubahan secara terus menerus dengan berbagai pertimbangan dan bumbu pro dan kontra di dalamnya. Walaupun demikian, pada hakikatnya setiap pendidikan dengan pola dan sistem apapun memiliki dasar yang baik, yakni meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh manusia itu sendiri agar menjadi pribadi yang unggul, berkualitas dan kompetitif.

Berkaitan dengan pendidikan ini, peneliti menyoroti dinamika atau perkembangan pendidikan yang nantinya akan dilakukan

pengujian terhadap keadaan PM pada suatu daerah tersebut. Ada dua cara yang bisa dilakukan dalam melakukan kajian pada spek pendidikan yang dimaksud, yakni dengan cara mengetahui data perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada suatu daerah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk berdasarkan kelompok usia sekolah tertentu yang sedang sekolah tanpa harus memandang kelompok jenjang sekolah yang seharusnya atau sesuai dengan kelompok usia sekolah penduduk itu sendiri. Kebutuhan data ini adalah untuk mengukur sejauh mana akses atau keterbukaan akses pendidikan yang dapat dicapai oleh masyarakat secara umum tanpa harus memperhatikan ketepatan antara kelompok usia sekolah penduduk dengan ketepatan kelompok usia jenjang pendidikan tertentu.

Rumus yang bisa dipakai dalam menghitung APS pada suatu daerah adalah dengan cara membagi jumlah penduduk kelompok usia sekolah penduduk yang bersekolah dengan jumlah penduduk yang berusia sekolah secara keseluruhan, selanjutnya dikalikan dengan angka 100 agar diketahui persentasenya.

Dalam menentukan APS ini akan lebih luas dan terbuka, sebab yang dilakukan adalah dengan cara mencari tahu jumlah penduduk yang mengakses pendidikan tanpa harus memperhatikan ketepatan usia penduduk dengan kelompok jenjang pendidikan tertentu. Pendidikan yang diperhitungkan dalam hal ini terdiri dari pendidikan formal maupun non formal. APS pada suatu daerah akan sangat beragam dalam perkembangannya, tergantung keadaan dan faktor-faktor yang ada pada suatu daerah itu sendiri. Adapun rincian APS pada daerah yang menjadi objek penelitian ini

dapat dijabarkan sebagai berikut :²⁷

Tabel 3

Wilayah Kabupaten	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten /Kota se Propinsi Jawa Barat											
	SD/MI/Paket A			SMP/MTS/Paket B			SMA/MA/Paket C			Perguruan Tinggi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Garut	99.62	99.83	99.79	93.30	94.15	94.00	64.08	60.82	60.48	11.56	11.70	11.42
Subang	99.03	99.82	99.59	91.84	91.17	92.16	60.52	66.91	65.83	11.07	10.09	9.41
Purwakarta	99.27	99.14	99.40	93.84	94.72	94.56	56.34	61.15	60.82	17.78	19.04	18.39
Kota Tasikmalaya	98.70	99.55	99.46	95.18	94.96	95.44	80.28	77.22	76.38	28.20	20.20	19.46

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada empat kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian, dalam rentang waktu 2017-2019 adalah semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar kecenderungan mengalami penurunan. Adapun lebih detailnya dapat diuraikan melalui table sebagai berikut :²⁸

Tabel 4

Wilayah Kabupaten	Selisih Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten /Kota se Propinsi Jawa Barat							
	SD		SMP		SMA		PT	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Garut	0.21	-0.04	0.85	-0.15	-3.26	-0.34	0.14	-0.28
Subang	0.79	-0.23	-0.67	0.99	6.39	-1.08	-0.98	-0.68
Purwakarta	-0.13	0.26	0.88	-0.16	4.81	-0.33	1.26	-0.65
Kota Tasikmalaya	0.85	-0.09	-0.22	0.48	-3.06	-0.84	-8	-0.74

Keadaan APM pada kabupaten Garut pada tahun 2018 rata-rata mengalami peningkatan pada setiap jenjang pendidikan. Hanya saja penurunan APS terjadi pada kelompok usia jenjang pendidikan SMA yang menyentuh angka -3,26%. Sedangkan, keadaan APS pada tahun 2019 pada setiap kelompok usia jenjang pendidikan mengalami

²⁷ Badan Pusat Statistik : <https://bps.go.id/indicator/26/36/1/indeks-pembangunan-manusia.html> Access Time: November 17, 2021, 11:58

²⁸ Badan Pusat Statistik : <https://bps.go.id/indicator/26/36/1/indeks-pembangunan-manusia.html> Access Time: November 17, 2021, 11:58

menurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019 ini maka dapat diasumsikan ada suatu permasalahan yang harus dicari tahu penyebabnya kemudian dilakukan penyelesaian agar tidak terjadi di kemudian hari dan berlarut-larut. Selanjutnya, untuk kabupaten Subang keadaan APS pada tahun 2018 terjadi kenaikan dan penurunan APS yang berimbang pada keempat kelompok usia jenjang pendidikan. Keadaan APS yang mengalami kenaikan terjadi pada kelompok usia jenjang pendidikan SD, dengan angka selisih kenaikan sebesar 0,79% dan kelompok usia jenjang pendidikan SMA yang menyentuh angka 6,39%.

Sedangkan, penurunan terjadi pada kelompok usia jenjang pendidikan SMP dengan selisih angka penurunan sebanyak -0,67% dan kelompok usia jenjang pendidikan tinggi dengan selisih angka penurunan sebanyak -0,98%. Pada tahun 2019, keadaan APS pada setiap kelompok usia jenjang pendidikan rata-rata mengalami penurunan, hanya tersisa kelompok usia jenjang pendidikan SMP saja yang mengalami kenaikan, dengan selisih angka kenaikan sebesar 0,99%.

Selanjutnya, di kabupaten Purwakarta keadaan APS pada tahun 2018 cenderung mengalami kenaikan pada setiap kelompok usia jenjang pendidikan, penurunan APS hanya terjadi pada kelompok usia jenjang pendidikan SD dengan selisih angka penurunan sebanyak -0,13% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan, pada tahun 2019 rata-rata terjadi penurunan APS pada kelompok usia jenjang pendidikan, terutama pada kelompok usia jenjang pendidikan tinggi yang mengalami selisih angka penurunan terbesar, yaitu sebanyak -0,65%. Sedangkan, satu-satunya kelompok usia jenjang pendidikan yang mengalami kenaikan hanya

terjadi pada kelompok usia jenjang pendidikan SD, dengan selisih angka kenaikan sebesar 0,26%.

Terakhir, keadaan APS pada kota Tasikmalaya tahun 2018 rata-rata mengalami penurunan pada kelompok usia jenjang pendidikan. Hanya ada satu kelompok usia jenjang pendidikan yang mengalami kenaikan, yaitu pada kelompok usia jenjang pendidikan SD, dengan selisih angka kenaikan sebesar 0,85%. Sedangkan pada tahun 2019 rata-rata mengalami penurunan APS. Hanya ada satu kelompok usia jenjang pendidikan yang mengalami kenaikan, yaitu pada kelompok usia jenjang pendidikan SMP dengan selisih angka kenaikan yang menyentuh pada 0,48%.

Analisis yang bisa diambil dari fakta APS sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil beberapa poin, yakni :

- 1) Rata-rata keadaan APS pada 3 tahun terakhir, yakni 2017-2019 di setiap kabupaten/kota berdasarkan kelompok usia jenjang pendidikan SD secara berurutan dari yang paling tinggi kepada yang paling rendah, dipimpin oleh Kota Tasikmalaya, Subang, Garut dan Purwakarta. 2)
- 2) Rata-rata keadaan APS pada 3 tahun terakhir, yakni 2017-2019 di setiap kabupaten/kota berdasarkan kelompok usia jenjang pendidikan SMP secara berurutan dari yang paling tinggi kepada yang paling rendah, dipimpin oleh Purwakarta, Garut, Subang dan Kota Tasikmalaya.
- 3) Rata-rata keadaan APS pada 3 tahun terakhir, yakni 2017-2019 di setiap kabupaten/kota berdasarkan kelompok usia jenjang pendidikan SMA secara berurutan dari yang paling tinggi kepada yang paling rendah, dipimpin oleh Subang, Purwakarta, Garut dan Kota Tasikmalaya.
- 4) Rata-rata keadaan APS pada 3 tahun terakhir, yakni 2017-2019

di setiap kabupaten/kota berdasarkan kelompok usia jenjang pendidikan Pendidikan Tinggi secara berurutan dari yang paling tinggi kepada yang paling rendah, dipimpin oleh Purwakarta, Garut, Subang dan Kota Tasikmalaya.

- 5) Berdasarkan data APS pertahun 2017-2019, rata-rata keadaan APS di setiap kabupaten/kota mengalami penurunan yang sangat besar pada tahun 2019 pada setiap kelompok usia jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk berdasarkan usia sekolah yang sedang melaksanakan pendidikan pada usia dan jenjang pendidikan yang tepat dan seharusnya. Dalam arti usia penduduk yang bersekolah tersebut adalah sesuai antara kelompok umur dengan jenjang pendidikan formal yang sedang diikutinya. Begitupun dengan pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C) turut juga diperhitungkan.

Rumus yang dipakai dalam penghitungan APM_{ini} adalah dengan cara membagi kelompok usia sekolah yang menempuh pendidikan sesuai dengan usia kelompok jenjang sekolah tertentu dengan jumlah penduduk yang berusia pada kelompok usia sekolah yang sama, selanjutnya dikalikan dengan angka 100 agar diketahui tingkat prosentasenya. Secara umum APM pada suatu daerah cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan APS, sebab pada APM_{ini} ada batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam pendidikan, salah satunya adalah kelompok usia penduduk yang harus tepat dengan kelompok usia jenjang pendidikan, sedangkan, pada APS tidak berlaku hal tersebut. Selain tu, ada beberapa faktor lain yang turut menyumbang rendahnya APM suatu daerah, seperti : *mindset*/cara berpikir masyarakat yang tidak mementingkan pendidikan masih banyak, faktor ekonomi, pemerataan fasilitas

pendidikan dan lain-lain.²⁹

Tabel 5

Wilayah Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Murni Menurut Kabupaten/Kota se Propinsi Jawa Barat											
	SD/MI/Paket A			SMP/MTS/Paket B			SMA/MA/Paket C			Perguruan Tinggi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Garut	98.41	99.27	99.17	77.74	78.83	82.60	49.49	50.90	51.04	7.89	6.47	6.64
Subang	96.34	98.45	98.88	80.10	80.04	79.74	51.77	52.89	51.82	7.87	5.73	3.69
Purwakarta	97.91	96.08	95.51	74.90	72.59	72.42	55.20	55.35	56.07	12.27	8.40	9.66
Kota Tasikmalaya	96.90	94.63	94.59	76.65	78.53	81.31	66.52	69.36	70.30	21.05	17.01	17.94

Sama halnya dengan APS, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) pada empat kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian, dalam rentang waktu 2017-2019 adalah semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar kecenderungan mengalami penurunan. Adapun lebih detailnya dapat diuraikan melalui table sebagai berikut :³⁰

Tabel 6

Wilayah Kabupaten	Angka Partisipasi Murni Menurut Kabupaten/Kota se Propinsi Jawa Barat							
	SD		SMP		SMA		PT	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Garut	0.86	-0.1	1.09	3.77	1.41	0.14	-1.42	0.17
Subang	2.11	0.43	-0.06	-0.3	1.12	-1.07	-2.14	-2.04
Purwakarta	-1.83	-0.57	-2.31	-0.17	0.15	0.72	-3.87	1.26
Kota Tasikmalaya	-2.27	-0.04	1.88	2.78	2.84	0.94	-4.04	0.93

Keadaan APM pada kabupaten Garut pada tahun 2018 rata-rata mengalami peningkatan pada setiap jenjang pendidikan. Hanya saja penurunan APM terjadi pada jenjang pendidikan tinggi yang menyentuh angka -1,42%. Artinya angka putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi masih cukup tinggi di

²⁹ Badan Pusat Statistik : <https://bps.go.id/indicator/26/36/1/indeks-pembangunan-manusia.html> Access Time: November 17, 2021, 11:58

³⁰ Badan Pusat Statistik : <https://bps.go.id/indicator/26/36/1/indeks-pembangunan-manusia.html> Access Time: November 17, 2021, 11:58

kabupaten Garut.

Sedangkan, pada tahun 2019 angka putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi sudah bisa diatasi, walaupun tidak maksimal. Kenaikan tersebut hanya dapat menyentuh selisih angka kenaikan APM sebesar 0,17%. Artinya, sebanyak 1,25% angka putus sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi belum tertutupi. Selanjutnya, pada kabupaten Subang keadaan APM pada tahun 2018 rata-rata mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Kenaikan APM hanya terjadi pada jenjang pendidikan SD dan SMA, yang masing-masing memperoleh selisih kenaikan angka sebesar 2,11% dan 1,12%.

Sedangkan, pada tahun 2019 perkembangan APM di kabupaten Subang rata-rata mengalami penurunan yang signifikan, sementara itu hanya pada jenjang pendidikan SD saja yang mengalami kenaikan sebesar 0,43%. Selanjutnya, pada kabupaten Purwakarta keadaan APM pada tahun 2018 juga cenderung mengalami penurunan pada setiap jenjang pendidikan, hanya pada jenjang pendidikan SMA yang memiliki selisih kenaikan sebanyak 0,15% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan, pada tahun 2019 ada peningkatan APM pada jenjang pendidikan tinggi sebanyak 1,26%, akan tetapi tetap saja tidak mampu mengembalikan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan tinggi tahun sebelumnya yang telah menyentuh angka 3,87%. Terakhir, keadaan APM pada kota Tasikmalaya tahun 2018 rata-rata mengalami kenaikan.

Penurunan APM hanya terjadi pada jenjang pendidikan SD dan pendidikan tinggi, masing-masing mengalami penurunan sebesar 2,27% dan 4,04%. Sedangkan pada tahun 2019 rata-rata mengalami kenaikan angka APM. Hanya ada satu jenjang pendidikan yang mengalami penurunan, yaitu pada jenjang pendidikan SD yang

menyentuh angka -0,04%.

Analisis yang bisa diambil dari fakta APM sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil beberapa poin, yakni :

- 1) Keadaan APM pada jenjang pendidikan SD yang paling rendah didominasi oleh kota Purwakarta yang telah mengalami penurunan sampai kepada angka -2.4, selanjutnya disusul oleh kota Tasikmalaya dengan capaian penurunan pada angka -2.31%. Sedangkan, kenaikan APM pada jenjang ini didominasi oleh kabupaten Subang yang rata-rata mengalami kenaikan sampai kepada angka 2.54%, selanjutnya disusul oleh kabupaten Garut yang rata-rata mencapai selisih angka kenaikan sebesar 0.76%.
- 2) Keadaan APM pada jenjang pendidikan SMP secara berturut-turut dipimpin oleh kabupaten Garut, kota Tasikmalaya, kabupaten Subang dan kabupaten Purwakarta.
- 3) Selanjutnya, keadaan APM pada jenjang pendidikan tinggi dengan selisih kenaikan paling tinggi secara berturut-turut dipimpin oleh kota Tasikmalaya, kabupaten Garut, kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang.
- 4) Sedangkan, keadaan APM pada jenjang pendidikan tinggi selisih angka penurunan APM tertinggi, secara berturut-turut dipimpin oleh kabupaten Subang, kota Tasikmalaya, kabupaten Purwakarta dan kabupaten Garut.

b. Garis Kemiskinan

Secara definisi Garis Kemiskinan (GK) diartikan sebagai representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan minuman setiap individu yang setara dengan kebutuhan 2100 kilo kalori per kapita per hari

serta kebutuhan pokok non makanan.

GKini dibutuhkan untuk mengukur atau sebagai indikator keadaan masyarakat miskin pada suatu daerah, Pada akhirnya setiap penduduk yang memiliki penghasilan dari pencahariannya yang berada di bawah Garis Kemiskinan tersebut maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan pada setiap daerah tentunya berbeda-beda, tergantung pada keadaan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Kebutuhan data Garis Kemiskinan pada penelitianini sangat dibutuhkan, sebab dengannya akan diketahui berapa banyak jumlah penduduk miskin dalam arti yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan tersebut. Semakin rendah penghasilan seseorang dan hidup dalam keadaan miskin, atau bahkan lebih rendah dari garis kemiskinan tersebut. Maka, dapat dikategorikan sebagai penduduk yang rawan serta berpotensi menjadi korban dalam praktik kejahatan *human trafficking*. Sebab, keadaan ekonomi yang rendah merupakan satu-satunya alasan yang sangat mendasar bagi para korban *human trafficking*, baik korban pada aspek seksual maupun non seksual.

Berkaitan dengan halini, berikut adalah data garis kemiskinan (GK) pada setiap daerah yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik³¹.

Tabel 7

No	Wilayah Kabupaten	Garis Kemiskinan (GK)			Rata-Rata
		2018	2019	2020	
1	Purwakarta	433,972	440,347	378,287	417,535
2	Kota Tasikmalaya	324,958	334,590	470,150	376,566
3	Subang	352,061	367,273	351,885	357,073
4	Garut	306,759	311,848	310,437	309,681

³¹ Badan Pusat Statistik : <https://bps.go.id/indicator/26/36/1/indeks-pembangunan-manusia.html> Access Time: November 17, 2021, 11:58

Jika melihat table tersebut, angka Garis Kemiskinan (GK) paling tinggi ada pada kabupaten Purwakarta, selanjutnya disusul oleh kota Tasikmalaya, kabupaten Subang dan kabupaten Garut. Berdasarkan halini maka berlaku asumsi bahwasannya semakin tinggi angka garis kemiskinan suatu daerah, maka semakin tinggi juga pemasukan yang harus didapatkan oleh penduduk suatu daerah untuk menopang kehidupannya. Ketika halini tidak terjadi maka akan semakin bertambah angka jumlah penduduk miskin suatu daerah.

c. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin diartikan sebagai penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan suatu daerah. Halini sangat penting untuk diperhitungkan untuk menguji keadaan potensi *human trafficking* terjadi di suatu daerah. Sebab dengan angka garis kemiskinan yang tinggi sampai dengan yang rendah yang berbeda-beda pada setiap daerah tidak menjamin pendapatan penduduk akan mengikuti kurva tersebut, karena tidak setiap penduduk yang hidup pada suatu daerah mendapatkan pendapatan dari daerah sama.

Berkaitan dengan halini, berikut adalah data penduduk miskin pada setiap daerah yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik :³²

Tabel 8

No	Wilayah Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)			
		2018	2019	2020	Rata-Rata
1	Garut	241.30	235.20	262.80	246.43
2	Subang	136.60	129.20	149.80	138.53
3	Kota Tasikmalaya	84.20	77.00	86.10	82.43
4	Purwakarta	75.90	71.90	80.20	76.00

³² Badan Pusat Statistik : <https://bps.go.id/indicator/26/36/1/indeks-pembangunan-manusia.html> Access Time: November 17, 2021, 11:58

Berdasarkan table tersebut jumlah penduduk miskin pada suatu daerah secara berurutan dari yang tertinggi hingga terendah, dipimpin oleh kabupaten Garut, selanjutnya kabupaten Subang, kota Tasikmalaya dan terakhir kabupaten Purwakarta. U niknya tabulasi jumlah penduduk miskinini berbanding terbalik dengan jumlah angka Garis Kemiskinan diatas.

2. Rating PMKS Potensi Human Trafficking

Upaya praktik kejahatan *human trafficking* ini biasanya dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Maka dari itu dibutuhkan metode dan cara yang tepat dalam melakukan investigasi agar dapat diperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang sangat mendetail.

Tim peneliti dalam hal ini mencoba melakukan analisis terhadap kemungkinan-kemungkinan dan asumsi yang berkaitan dengan beberapa data pendukung dalam proses penelitian, adapun data-data tersebut diantaranya adalah : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Garis Kemiskinan (GK) dan Jumlah Penduduk Miskin (PM) serta beberapa data lapangan yang ditemukan oleh Tim Peneliti pada sampling di beberapa daerah yang menjadi objek penelitian. Adapun uraian data dan analisis lengkapnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 9

RATA-RATA				
Wilayah Kabupaten/Kota	APM	APS	GK	PM
	2017-2019	2017-2019	2018-2020	2018-2020
Garut	59.04	66.73	Rp309,681	262,780
Subang	58.94	66.45	Rp357,073	149,810
Kota Tasikmalaya	65.40	73.75	Rp376,566	86,130
Purwakarta	58.86	67.87	Rp417,535	80,170

Melihat table yang berkaitan dengan ndeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Garis Kemiskinan (GK) dan Jumlah Penduduk Miskin (PM) sebagaimana yang telah dijabarkan dan dianalisis berdasarkan aspek data diatas. Maka, pada kesempatanini peneliti memiliki beberapa poin yang bisa diuraikan sebagai buah dari analisis terhadap data-data tersebut secara keseluruhan.

Dari ke empat kabupaten/kota yang menjadi objek sampling data dalam peelitianini, dalam periode 3 tahun terakhir antara tahun 2018-2020, kabupaten Subang merupakan daerah yang menduduki PM ke-3 dengan perolehan nilai rata-rata PM sebesar 69,22, setelah sebelumnya dipimpin oleh kota Tasikmalaya, kabupaten Purwakarta dan kabupaten Garut berada pada posisi terakhir.

Sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah tersebut berada pada peringkat ke-2 terbanyak setelah kabupaten Garut dengan pencapaian nilai rata-rata 149.810 orang pada nilai rata-rata Garis Kemiskinan (GK) sebanyak 350,073 rupiah, selanjutnya disusul oleh kota Tasikmalaya dan kabupaten Purwakarta.

Sedangkan, untuk perolehan nilai rata-rata kabupaten Subang dalam Angka Partisipasi Murni (APM) berada pada posisi kurang menguntungkan dengan nilai rata-rata 58,94% pada posisi paling rendah setelah kota Tasikmalaya, kabupaten Garut dan terakhir pada psosisi keempat diisi oleh kabupaten Purwakarta. Selanjutnya nilai rata-rata pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) kabupatenSubang memiliki nilai 66,45% dengan menempati urutan terakhir, setelah sebelumnya diduduki oleh kota Tasikmalaya, kabupaten Purwakarta dan kabupaten Garut.

Permasalahan sosial yang berkaitan dengan keadaan penduduk pada suatu daerah pun sangat beragam dan dibutuhkan upaya penyelesaian terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS) tersebut. Sebab, keadaan penduduk dengan status penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tinggi sangat berpotensi dan rawan menjadi korban dalam praktik kejahatan *human trafficking*. Selengkapnya data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kabupaten Subang

Keadaan penduduk yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kabupaten Subang berdasarkan data tahun 2020 didominasi oleh jenis masalah fakir miskin/rumah tangga miskin, selanjutnya disusul oleh keadaan Anak Gelandangan, Wanita Tuna Susila, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Gelandangan, Anak Terlantar, Pengemis, Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Anak Jalanan. Sedangkan korban *human trafficking* yang telah diketahui pada kabupaten Subang ini mencapai angka 22 orang pada tahun 2017-2018, sedangkan pada tahun 2019-2020 sebanyak 5 orang.

Selain itu ada beberapa jenis permasalahan yang belum berhasil diantisipasi dan dicarikan penyelesaiannya, yakni permasalahan-permasalahan PMKS yang terus bertambah pada setiap tahunnya. Untuk selengkapnya dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut :³³

³³ Editor, "Data PMKS", Pada Open Data Jawa Barat

Tabel 10

DATA PMKS PERIODE 2017-2020					
NAMA KABUPATEN	NO MASALAH	JENIS MASALAH	JUMLAH (ORANG)		SELISIH
			2018	2020	
KABUPATEN SUBANG	1	ANAK GELANDANGAN	-	3,423	3,423
	2	ANAK JALANAN	2	15	13
	3	ANAK TERLANTAR	5,546	50	-5,496
	4	ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS	0	20	20
	5	FAKIR MISKIN/RUMAH TANGGA MISKIN	137,193	211,890	74,697
	6	GELANDANGAN	13	50	37
	7	KORBAN TRAFFICKING	22	5	-17
	8	PENGEMIS	61	25	-36
	9	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	8,286	657	-7,629
	10	TUNA SUSILA	518	824	306
JUMLAH			151,641	216,959	65,318

b. Kabupaten Purwakarta

Keadaan penduduk yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kabupaten Purwakarta berdasarkan data tahun 2020 didominasi oleh jenis masalah fakir miskin/rumah tangga miskin, selanjutnya disusul oleh keadaan Pengemis, Perempuan rawan Sosial Ekonomi, Anak Terlantar, Gelandangan, Wanita Tuna Susila, Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Anak Jalanan. Sedangkan korban *human trafficking* yang telah diketahui pada kabupaten Purwakartaini mencapai angka 3 orang pada tahun 2017-2018, sedangkan pada tahun 2019-2020 sebanyak 1 orang. Selain itu ada beberapa jenis permasalahan yang belum berhasil diantisipasi dan dicarikan penyelesaiannya, yakni permasalahan-permasalahan PMKS yang terus bertambah pada setiap tahunnya. Untuk selengkapnya dapat dijabarkan pada table sebagai berikut :³⁴

³⁴ Editor, "Data PMKS", Pada Open Data Jawa Barat

Tabel 11

DATA PMKS PERIODE 2017-2020					
NAMA KABUPATEN	NO MASALAH	JENIS MASALAH	JUMLAH (ORANG)		SELISIH
			2018	2020	
KABUPATEN PURWAKARTA	1	ANAK GELANDANGAN	-	389	389
	2	ANAK JALANAN	76	62	-14
	3	ANAK TERLANTAR	199	527	328
	4	ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS	32	112	80
	5	FAKIR MISKIN/RUMAH TANGGA MISKIN	46,478	27,653	-18,825
	6	GELANDANGAN	3	389	386
	7	KORBAN TRAFFICKING	3	1	-2
	8	PENGEMIS	9	1,495	1,486
	9	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	3,042	1,478	-1,564
	10	TUNA SUSILA	23	215	192
JUMLAH			49,865	32,321	-17,544

c. Kota Tasikmalaya

Keadaan penduduk yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Tasikmalaya berdasarkan data tahun 2020 didominasi oleh jenis masalah fakir miskin/rumah tangga miskin, selanjutnya disusul oleh keadaan Perempuan rawan Sosial Ekonomi, Anak Terlantar, Wanita Tuna Susila, Anak Jalanan, Anak Gelandangan, Gelandangan, Pengemis, dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Sedangkan korban *human trafficking* yang telah diketahui pada Kota Tasikmalayaini mencapai angka 0 orang pada tahun 2017-2018, sedangkan pada tahun 2019-2020 sebanyak 1 orang. Selain tu ada beberapa jenis permasalahan yang belum berhasil di antisipasi dan dicarikan penyelesaiannya, yakni permasalahan-permasalahan PMKS yang terus bertambah pada setiap tahunnya. Untuk selengkapnya dapat dijabarkan pada table sebagai berikut :³⁵

³⁵ Editor, "Data PMKS", Pada Open Data Jawa Barat

Tabel 12

DATA PMKS PERIODE 2017-2020					
NAMA KABUPATEN	NO MASALAH	JENIS MASALAH	JUMLAH (ORANG)		SELISIH
			2018	2020	
KOTA TASIKMALAYA	1	ANAK GELANDANGAN	-	139	139
	2	ANAK JALANAN	179	187	8
	3	ANAK TERLANTAR	3	405	402
	4	ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS	-	18	18
	5	FAKIR MISKIN/RUMAH TANGGA MISKIN	180,407	72,785	-107,622
	6	GELANDANGAN	-	51	51
	7	KORBAN TRAFFICKING	-	1	1
	8	PENGEMIS	-	49	49
	9	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	300	6,619	6,319
	10	TUNA SUSILA	-	401	401
JUMLAH			180,889	80,655	-100,234

d. Kabupaten Garut

Keadaan penduduk yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Garut berdasarkan data tahun 2020 didominasi oleh jenis masalah fakir miskin/rumah tangga miskin, selanjutnya disusul oleh keadaan Perempuan rawan Sosial Ekonomi, Anak Terlantar, Anak Gelandangan, Pengemis, Wanita Tuna Susila, Anak Jalanan, Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Gelandangan.

Sedangkan korban *human trafficking* yang telah diketahui pada Kabupaten Garut mencapai angka 34 orang pada tahun 2017-2018, sedangkan pada tahun 2019-2020 sebanyak 40 orang. Selain itu ada beberapa jenis permasalahan yang belum berhasil diantisipasi dan dicarikan penyelesaiannya, yakni permasalahan-permasalahan PMKS yang terus bertambah pada setiap tahunnya. Untuk selengkapnya dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut :³⁶

³⁶ Editor, "Data PMKS", Pada Open Data Jawa Barat

Tabel 13

DATA PMKS PERIODE 2017-2020					
NAMA KABUPATEN	NO MASALAH	JENIS MASALAH	JUMLAH (ORANG)		SELISIH
			2018	2020	
KOTA GARUT	1	ANAK GELANDANGAN	-	1,096	1,096
	2	ANAK JALANAN	113	65	-48
	3	ANAK TERLANTAR	22,950	3,198	-19,752
	4	ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS	81	46	-35
	5	FAKIR MISKIN/RUMAH TANGGA MISKIN	1,137,797	281,587	-856,210
	6	GELANDANGAN	26	20	-6
	7	KORBAN TRAFFICKING	34	40	6
	8	PENGEMIS	371	348	-23
	9	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	29,445	7,798	-21,647
	10	TUNA SUSILA	173	110	-63
JUMLAH			1,190,990	294,308	-896,682

B. Penanganan Permasalahan Sosial (PMKS) di Jawa Barat

Permasalahan yang berkaitan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan salah satu permasalahan bangsa yang patut mendapatkan perhatian. Sebab pada setiap Negara memiliki kesamaan tujuan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan Negara, yakni menyejahterakan bangsanya tu sendiri.

Begitu pula dengan tujuan Negara Indonesia sebagai penganut paham Demokrasi yang seringkali populer dengan sebutan sebuah sistem yang dibuat oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Hal tersebut berarti bahwa setiap kebijakan atau pengambilan keputusan yang diambil harus berdasarkan atas nama kepentingan rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat tu sendiri.

Pancasila sebagai dasar hukum Negara memiliki nilai- nilai universal pada setiap poinnya yang menghendaki kemaslahatan umum dalam segala urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga sebagaimana yang tercantum dalam alinea pembukaan UUD 1945. Selain tu, ditegaskan pula dalam Pasal34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

"Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara"

dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Selain daripada itu masih banyak sekali instrument hukum yang mengatur tentang keharusan mengutamakan kepentingan umum atau masyarakat diatas kepentingan golongan lainnya. Permasalahan PMKS dari keempat kabupaten/kota yang menjadi objek dalam penelitian ini masing-masing memiliki popularitas jenis permasalahan yang berbeda-beda pada setiap tahunnya, sebagaimana yang telah diuraikan pada pemaparan diatas.

Secara umum berdasarkan data periode tahun 2017-2018 *trend* jenis permasalahan PMKS didominasi oleh permasalahan Fakir Miskin/Rumah Tangga Miskin dengan capaian angka sebesar 1,501,875 orang, selanjutnya disusul oleh Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Sebanyak 41,073 Orang, Anak Terlantar Sebanyak 28,698 Orang, Tuna Susila sebanyak 714 orang, Pengemis sebanyak 441 orang, Pemulung sebanyak 411 orang, Anak Jalanan sebanyak 370 orang, Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebanyak 113 orang, Korban Trafficking sebanyak 59 orang, dan terakhir Gelandangan sebanyak 42 orang.

Sedangkan, pada periode tahun 2019-2020 *trend* jenis permasalahan PMKS didominasi oleh permasalahan Fakir Miskin/Rumah Tangga Miskin dengan capaian angka sebesar 593,915 orang, selanjutnya disusul oleh Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Sebanyak 16,552 orang, Anak Gelandangan sebanyak 5,047 orang, Anak Terlantar Sebanyak 4,180 orang, Pengemis sebanyak 1,917 orang, Tuna Susila sebanyak 1,550 orang, Pemulung sebanyak 892 orang, Gelandangan sebanyak 510 orang, Anak Jalanan sebanyak 329 orang, Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebanyak 196 orang dan Korban Trafficking sebanyak 59 orang. Adapun data lengkapnya disajikan dalam table berikut :

Tabel 14

NO	TREND PMKS 4 KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN TAHUN			
	JENIS MASALAH	2018	2020	JUMLAH
1	FAKIR MISKIN/RUMAH TANGGA MISKIN	1,501,875	593,915	2,095,790
2	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	41,073	16,552	57,625
3	ANAK TERLANTAR	28,698	4,180	32,878
4	ANAK GELANDANGAN	0	5,047	5,047
5	PENGEMIS	441	1,917	2,358
6	TUNA SUSILA	714	1,550	2,264
7	PEMULUNG	411	892	1,303
8	ANAK JALANAN	370	329	699
9	GELANDANGAN	42	510	552
10	ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS	113	196	309
11	KORBAN TRAFFICKING	59	47	106

Berdasarkan perkembangan data PMKS diatas ada beberapa hal yang perlu dikritisi serta dikaji secara mendalam, terkait potensi bertambahnya angka kasus kejahatan *human trafficking*. Catatan-catatan analisis tersebut diruainkan dalam beberapa poin dibawahini :

Keberadaan fakir miskin/rumah tangga miskin dan perempuan rawan sosial ekonomi dari tahun 2017 sampai dengan 2020 menempati urutan pertama dengan jumlah yang sangat besar sangat rawan dan berpotensi terjadinya praktik kejahatan *human trafficking*, mengingat masalah perekonomian merupakan satu-satunya alasan mendasar yang menjadi menyebabkan para korban terlibat dalam kejahatan tersebut;

Jumlah pemulung, gelandangan, pengemis sampai kepada tahun 2020 terus mengalami kenaikan keberadaannya. Halini tentu saja sangat rawan terjadi praktik kejahatan human trafficking, sebab lagi-lagi karena alasan ekonomi dan terkadang para PMKS dengan kategori ini yang memiliki keluarga cenderung lalai atau tidak terlalu memperhatikan terhadap kesiapan masa depan anak-anak mereka terutama terkait dengan pendidikan. Terlebih lagi PMKS dengan kategori Wanita tuna susila yang terus bertambah sudah sangat jelas sebagai korban sekaligus pelaku human trafficking. Oleh karena tu

perlu dicarikan solusi sebagai upaya preventif dan referentif terhadap praktik kejahatan tersebut;

Anak Jalanan, Anak Terlantar dan Anak Gelandangan serta Anak yang memerlukan perlindungan khusus masih berjumlah besar sebagai bagian dari PMKS, mereka merupakan pewaris Negara masa depan yang harus benar-benar diperhatikan agar tidak dirusak dan dijadikan korban oleh para pelaku kejahatan *human trafficking* yang sewaktu-waktu akan memangsa mereka sebagai sasaran kejahatan. Setiap pemerintahan daerah atau pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk menyelamatkan mereka, minimal terselamatkan dalam aspek kehidupan yang layak dan pendidikan. Asumsinya ketika Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) meningkat, maka akan mampu meminimalisir angka PMKS pada kategori ini. Lebih jauh dapat menyelamatkan generasi yang akan datang dari korban kejahatan *human trafficking*.

Angka temuan korban trafficking pada periode tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebanyak orang jika dibandingkan pada periode tahun 2017-2018. Hal ini tentu saja mengundang spekulasi, antara terjadi penurunan jumlah kasus atau ada banyak kasus yang belum terungkap. Mengingat angka-angka PMKS yang rawan dan berpotensi menjadi bagian *human trafficking* pada keempat kabupaten/kota tersebut masih tinggi.

Pemerintah Daerah melalui instansi pemerintah daerah salah satunya adalah dinas sosial yang merupakan kepanjangan tangan dari kementerian sosial di tingkat pemerintah pusat, merupakan salah satu instansi yang diberikan tupoksi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan PMKS.

Berdasarkan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKIP) yang dibuat oleh dinas sosial di kabupaten/kota termasuk provinsi setidaknya ada beberapa poin penting yang menjadi evaluasi, yakni :

Penanganan masalah PMKS yang dilaporkan oleh beberapa instansi diklaim telah melebihi target dari setiap tahun anggaran. Hal ini tentu saja perlu dikaji ulang sebab berdasarkan temuan peneliti masih banyak PMKS yang tidak terakomodir dalam upaya penanganan atau pemberdayaan yang dilakukan tersebut;

Dalam melaksanakan tugas penanganan, instansi menemukan beberapa kendala yang terbagi kepada Faktor internal (seperti : Koordinasi dan sinergitas yang kurang antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) dan minimnya sarana dan prasarana rehabilitasi) dan Faktor Eksternal, (seperti : terus bertambahnya angka PMKS, minimnya anggaran yang tidak proporsional dengan jumlah PMKS, persepsi penanganan PMKS yang belum satu arah dan penjangkauan Lembaga/Mitra penanganan PMKS belum maksimal).

Upaya-upaya penanganan yang dilakukan instansi cenderung ke arah referentif atau tidak berdampak jangka panjang, seperti : pemenuhan kebutuhan dasar PMKS, pemberian bantuan tunai dan lain-lain. Upaya tersebut dalam tempo singkat memang signifikan dilakukan, akan tetapi tidak memberikan nilai pendidikan, akibatnya para PMKS ini akan cenderung ke arah konsumtif ketimbang produktif.

Perlu dilakukan penanganan yang bersifat kontinuitas dan berjangka panjang dalam melakukan penanganan terhadap PMKS. Selain itu, perlu dipikirkan agar dalam pemberdayaan ini dapat saling menularkan di antara PMKS itu sendiri. Selain itu, pengawasan dan pengontrolan secara berkala perlu dilakukan oleh instansi, bila perlu dilakukan kerjasama dengan lembaga/mitra yang memiliki persepsi sama.

BAB 5

PENUTUP

A. Simpulan

Keadaan PMKS di keempat kabupaten/kota, yakni kabupaten Garut, Subang, kabupaten Purwakarta dan kota Tasikmalaya secara umum masih memiliki angka yang tinggi. Pembagian PMKS ini didasarkan pada 1) aspek korban *human trafficking* yang meliputi : korban trafficking dan Wanita tuna susila dengan jumlah cukup besar; 2) aspek kerawanan atau potensi korban *human trafficking*, meliputi : kategori miskin/rumah tangga miskin, perempuan rawan sosial yang menduduki peringkat pertama dengan jumlah terbanyak. pemulung, gelandangan, pengemis pada tahun 2020 terus mengalami kenaikan jumlahnya. Terakhir, kategori Anak Jalanan, Anak Terlantar dan Anak Gelandangan serta Anak yang memerlukan perlindungan khusus masih berjumlah besar.

Berdasarkan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKIP) yang dibuat oleh beberapa pemerintah daerah, berkaitan dengan laporan penanganan yang dilakukan oleh dinas sosial sebagai instansi pemerintah daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari kementerian sosial pada pemerintah pusat di nilai belum menunjukkan terobosan yang signifikan dalam upaya penanganan masalah PMKS yang bersifat preventif dan berkesinambungan. Program-program penanganan yang diberikan cenderung bersifat jangka pendek dan memberikan dampak budaya konsumtif bagi PMKS itu sendiri.

B. Rekomendasi

Keberadaan PMKS seharusnya menjadi pusat perhatian dalam pembangunan daerah, sebab potensi daerah akan lebih bisa dimaksimalkan manakal potensi sumber daya manusia didaerah tersebut baik. Upaya penanganan masalah PMKS didaerah harus dilakukan dengan sinergitas yang tinggi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Selain tu, pemberdayaan atau penanganan permasalahan PMKS harus dilakukan terobosan-terobosan baru sebagai bagian dari dengan upaya preventif dan berjangka panjang serta berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009)

Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012

Da niah, Rahmah dan Fajar Apria ni. “Kebijakan Nasional Anti-trafficking dalam Migrasi nternasional”, FISIP U niversitas Mulawarman Kalimantan Timur.

Darmastuti, Riska Ruly. 2015. “Kerjasama Polri dan OM dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2007-2013.” Journal of nternational Relations vol. 1 no. 2

Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komu nikasi dan Ilmu Sosial lainnya, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004

Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,

H.A.R Tilaar dan Hant Nugroho, Kebijakan Pendidikan; pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

Habibi, “Implikasi Calon Tunggal Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Terhadap Kualitas Demokrasi Daerah” dalam Asy-Syari,,ah Vol. 20 Nomor 2, Desember 2018

Harkristuti Harkrisnowo, “Tindak pidana perdagangan orang; Beberapa catatan”, Law Review, Vol. 7, Tahun 2007

Majna El-Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 47.

Nurkusuma Warda ni, Jurnal Imiah Trafficking Perempuan dan Anak, H.2

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan politik, 2007, Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Pencegahan Perdagangan Orang, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta

Rahmah Da niah dan Fajar Apria ni, “Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi nternasional,” Politica 8, no. 2 (2017)

Riza nizarli, Makalah : Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak, Disampaikan pada Acara Penjaringan Aspirasi Publik dalam Rangka Pembuata Qanun Perlindungan Anak, Kerjasama Biro PP, U nicef dan Plan nternational, Jantho, 26 Maret 2007.

Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2008

Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),

Sholichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke mplementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, Hal. 5-7

Sodikin, “Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, Nomor1 (2014)

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan

R&D, Alfabeta, Bandung, 2012

Tom obokata, “Human Trafficking, Rights and the Nationality, migration and Asylum Act”, *Europaan Human Rights Law Review*, Vol. 4 Tahun 2003

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Data Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

<http://www.komnasham.go.id/pendidikan-dan-penyuluhan/848-prinsip-prinsip-pokok-hak-asasi-manusia>, diakses Ju ni 2013.

<http://www.slideshare.net/kujays/makalah-11850826#btnNext>, diakses Sabtu 24 November 2012.

“Data PMKS”, Pada Open Data Jawa Barat

Pembukaan UUD 1945 Aline ke-4

Signifikansi Penanganan Human Trafficking Di Jawa Barat



ISBN 978-623-99024-1-4 (PDF)

